

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA, LANDASAN TEORIDAN KERANGKA BERPIKIR

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab masalah yang berhubungan dengan budaya priyayi Jawa, hegemoni yang dihadapi priyayi yang direpresentasikan dalam karya sastra, dan nilai pendidikan karakter yang mencakup respons pembaca terhadap karya sastra dalam kaitannya dengan pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Agar penelitian ini menghasilkan temuan-temuan yang kuat dengan analisis yang mendalam, perlu didukung oleh hasil penelitian yang relevan. Hasil-hasil penelitian tersebut antara lain penelitian budaya Jawa yang dilakukan oleh Saryono (2010) dan (2008), Damono (2000), Suroso (2003) (2012), Wardani (2009), Mawadah (2009), Sutardi dkk.(2013), Santosa dkk.(2012), Suwardi (2011), dan Murtisari. Kajian hegemoni ideologi dilakukan oleh Mary West (2009), Diniejko (2006), Sarmidi (2009), Supriyanto (2006), Nurhadi (2004), dan Wijakangka (2008), Silaen (2006), Mattei (2003), Saddhono dan Supeni (2014), dan Ahmadi (2014). Kajian pragmatika dan pendidikan karakter dilakukan oleh Indede (2001), Wright (2010), Triana (2012), Jadhav and Mothe (2010), dan Muslich K.S, dkk (2006), Hartini dkk. (2014) sebagaimana yang dipaparkan dalam kajian pustaka.

Kajian pustaka tersebut juga perlu didukung oleh teori yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Teori yang disajikan dalam kajian teori adalah teori yang berhubungan dengan teori hakikat novel, budaya priyayi, ideologi priyayi,

hegemoni, dan hegemoni budaya priyayi serta nilai-nilai pendidikan karakter dalam karya sastra.

### A. Kajian Pustaka

#### 1. Penelitian yang Relevan dengan Budaya Priyayi Jawa

Saryono (2010: 117) meneliti priyayi Jawa dengan judul “Sosok Priyayi Jawa dalam Teks Fiksi Indonesia” melalui 10 teks fiksi Indonesia. Sumber data dalam penelitian tersebut adalah fiksi *Sri Sumarah* (1986), *Bawuk* (1986), dan *Para Priyayi* karya Umar Kayam. *Canting* (1986) karya Arswendo Atmowiloto, *Pengakuan Pariyem* (1981) karya Linus Suryadi Ag; *Ibu Sinder* (1991) karya Pandir Kelana, *Burung-Burung Manyar* (1986) dan *Burung-Burung Rantau* (1993) karya Y.B. Mangunwijaya, dan *Pasar* (1993) karya Kuntowijaya.

Wacana fiksi tersebut dinyatakan Saryono (2010:123) merupakan visi, evokasi, eksposisi panorama, situasi, kondisi, dan nasib budaya priyayi Jawa di tengah konteks historis, ekonomis, sosial budaya, dan sosial politis dalam rangka kejawaan dan keindonesiaan. Budaya priyayi yang dikonstruksikan di dalam wacana fiksi tersebut pada umumnya adalah golongan priyayi berorientasi budaya spiritual, tradisional, mitis-ontologis, berpandangan dunia kosmosentris, statis-siklis, dan hierarkis. Priyayi berpandangan hidup elitis, otoriter, aristokratis, feodal, dan semi konservatif. Selain itu, priyayi juga bergaya hidup menekankan aspek ritual dan seremonial, religio-magisme, simbolisme, dan mitologi irasional, solidaritas mekanisme primordial, dan komunalitas (Saryono, 2010:138).

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa sosok priyayi yang digambarkan di dalam fiksi Indonesia secara kuat adalah orientasi budaya, pandangan dunia, pandangan hidup, dan gaya hidup priyayi yang relatif bermacam-macam. Dalam fiksi tersebut diceritakan priyayi Jawa yang mampu dan mau melakukan kritik atau menegasi keadaan yang tidak disetujui. Ada priyayi Jawa yang menerima dan meneguhkan budaya Jawa. Hal tersebut menandakan bahwa penggambaran budaya Jawa dalam teks fiksi Indonesia bukan hanya menjadi strategi Jawanisasi, tetapi lebih daripada itu justru menjadi strategi kritik dan negasi terhadap budaya Jawa yang ada, khususnya budaya priyayi yang tidak disetujui (Saryono, 2010:141).

Penelitian Saryono tersebut merupakan kelanjutan dari penelitian sebelumnya berjudul *Etika Jawa dalam Fiksi Indonesia, Representasi Nilai-Nilai Etis Jawa* (2008) dengan fokus masalah nilai kebijaksanaan dan nilai kekasihsayangan manusia Jawa. Data-data yang dikumpulkan berasal dari teks wacana *Pengakuan Pariyemkarya* Linus Suryadi A.G., *Bawuk*, *Sri Sumarah*, dan *Para Priyayikarya* Umar Kayam, *Cantingkarya* Arswendo Atmowiloto, *Tirai Menurun*, dan *Trilogi Ronggeng Dukuh Paruk* Ahmad Tohari. Karya-karya tersebut merepresentasikan berbagai hal yang bersangkutan dengan norma kepantasan pandangan hidup manusia Jawa (Saryono, 2008:4). Dalam penelitian tersebut, ditemukan representasi nilai kebijaksanaan dalam teks-teks fiksi Indonesia meliputi enam macam instrumental, yaitu nilai ketepatanjanjian, ketidakpilihkasihan, kemengertian, kelapangdadaan, kerendahhatian, dan ketenggangrasaan manusia Jawa. Nilai-nilai tersebut dihayati,

dipahami, ditafsirkan, dan atau dilaksanakan oleh golongan priyayi dan orang kecil secara sosiokultural dan religiokultural ( Saryono, 2008: 217-218).

Persamaan penelitian-penelitian Saryono dengan penelitian ini adalah objek yang diteliti adalah fiksi dengan fokus penelitian pada budaya priyayi Jawa. Fokus yang diteliti Saryono (2010) merupakan nilai-nilai budaya yang diterima dan ditolak. Penelitian yang sedang dilakukan untuk menjawab wujud budaya Jawa dan hegemoni priyayi yang diterapkan oleh priyayi dalam masyarakat Jawa. Selanjutnya, persamaan penelitian Saryono (2008) dengan penelitian yang sedang dilakukan adalah permasalahan kepantasan dan ketidakpantasan dalam budaya priyayi Jawa.

Perbedaan penelitian Saryono dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitian. Fokus penelitian Saryono masalah nilai-nilai budaya Jawa yang diterima dan ditolak dalam fiksi novel dan prosa lirik. Fokus dalam penelitian ini adalah wujud budaya priyayi Jawa yang dilakukan, hegemoni budaya priyayi Jawa, dan nilai-nilai pendidikan karakter dalam dalam novel. Subjek penelitian Saryono adalah perilaku orang Jawa pada novel, subjek penelitian ini adalah perilaku priyayi Jawa, hegemoni yang dihadapi priyayi Jawa dan hegemoni priyayi Jawa kepada *wong cilik*, serta nilai-nilai pendidikan karakter yang diterapkan priyayi Jawa di dalam novel.

Sumbangan penelitian yang dilakukan oleh Saryono memberi pijakan yang kuat terhadap konstruksi budaya yang diterapkan dalam analisis fiksi. Temuan hasil penelitian tersebut dapat mempertajam hasil analisis penelitian ini, terutama yang berhubungan dengan etika priyayi.

Penelitian budaya priyayi Jawa juga dilakukan oleh Sapardi Djoko Damono dengan judul *Priyayi Abangan* (2000). Penelitian tersebut sebelumnya berupa naskah disertasi yang dipertahankan oleh Sapardi Djoko Damono di Universitas Indonesia (1989) yang berjudul “Novel Jawa Tahun 1950-an: Telaah Fungsi, Isi, dan Struktur.” Dengan hasil penelitian tersebut, dinyatakan bahwa keinginan menjadi priyayi dan mempertahankan status kepriyayian merupakan tema-tema yang menarik pada novel Jawa tahun 1950-an. Dunia yang diciptakan dalam novel tersebut adalah dunia priyayi abangan. Dalam novel Jawa, juga ditemukan bahwa wayang merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan priyayi. Wayang merupakan bagian etika dan pandangan hidup bagi priyayi ideal. Tokoh priyayi berusaha menjalani kehidupan yang sebaik-baiknya sehingga bisa dijadikan teladan oleh pembaca. Mereka pada umumnya digambarkan sebagai satria-satria dalam dunia wayang yang mampu mengendalikan hawa nafsu, berjiwa luhur, dan bertingkah laku halus, menjunjung tinggi kepribadian, berbudaya, dan feodalistis (Damono, 2000: 385-388).

Dalam penelitian tersebut, juga ditemukan Damono (2000: 390) bahwa dalam novel Jawa yang berlatar sesudah perang, kekayaan dianggap bisa mengangkat saudagar menjadi priyayi. Kehidupan saudagar memiliki kesamaan derajat dengan priyayi yang feodalistis. Pencapaian status tidak harus melalui pencapaian pangkat, tetapi melalui kekayaan karena menurut pandangan masyarakat, kekayaan otomatis memberi status priyayi kepada seseorang.

Persamaan penelitian Damono dengan penelitian ini terletak pada subjek penelitian pada novel. Yaitu, etika yang dilakukan tokoh priyayi, dunia priyayi Jawa serta cara memperoleh status kepriyayian. Perbedaanannya, terletak pada objek penelitian Darmono adalah novel berbahasa Jawa, tetapi novel yang sedang diteliti merupakan novel berbahasa Indonesia yang mengandung unsur warna lokal Jawa, khususnya priyayi Jawa. Fokus penelitian yang dilakukan Damono adalah dunia priyayi abangan pada novel Jawa tahun 1950-an. Fokus penelitian yang sedang dilakukan adalah budaya priyayi, hegemoni priyayi, dan nilai pendidikan karakter priyayi pada tiga novel. Hasil penelitian Damono memiliki kontribusi yang signifikan pada penelitian yang sedang dilakukan karena nilai budaya priyayi abangan yang memiliki persepsi tentang hakikat takhayul, agama, Tuhan, sastra, wayang dan sikap priyayi terhadap kebendaan memberi referensi yang kokoh pada budaya priyayi yang sedang diteliti.

Penelitian yang relevan dengan budaya priyayi juga dilakukan oleh Suroso dalam makalah “kepriyayian Tokoh dalam Novel Warna Lokal Jawa dan Relevansinya dalam Sikap Hidup” yang disajikan dalam PIBSI XXV 6-7 Oktober 2003. Dalam makalah hasil penelitian tersebut dibahas masalah ideologi tokoh, filsafat pengarang, dan kepriyayian dalam masyarakat Jawa yang mencakup konsep priyayi Jawa dan priyayi-priyayi Jawa baru. Selain itu, juga dibahas tentang sikap tokoh utama priyayi dalam novel warna lokal *Pasar* karya Kuntowijaya, *Para Priyayi* karya Umar Kayam, dan novel *Canting* karya Arswendo Atmowiloto. Tokoh-tokoh tersebut dibahas dari segi sikap hidup dan relevansinya dengan masa kini.



Hasil pembahasan menunjukkan bahwa para tokoh utama dalam ketiga novel tersebut merupakan sosok yang dapat diteladani. Sifat dan sikap tokoh tersebut selalu *sabar, eling, rukun, sepi ing pamrih rame ing gawe, rila* atau ikhlas, jujur, dan *temen* di dalam mengatasi masalah yang menimpa diri mereka. Kepriyayan para tokoh tiga novel dapat diteladani bagi keluarga dan masyarakat karena (1) pada era kapitalistik dan materialistik sikap *eling* dapat dijadikan obat mencegah kerakusan yang melupakan etika masyarakat Jawa; (2) segala sesuatu akan bisa diselesaikan apabila disertai dengan kesabaran, kerendahhatian, dan kasih sayang; dan (3) sistem religius yang dibangun oleh para priyayi Jawa adalah hakikat campur tangan Tuhan, *sangkan paraning dumadi*, dan *manunggaling kawula gusti* yang menjadi landasan ideal orang Jawa untuk saling rukun, *saling menolong, nrimo, pasrah* terhadap apa yang digariskan Tuhan.

Persamaan hasil penelitian Suroso dengan penelitian ini terletak pada objek dan sumber data yang diteliti yaitu sikap atau pandangan hidup kepriyayan Jawa melalui tokoh utama dalam novel *Para Priyayi* dan novel *Canting*. Perbedaan antara penelitian Suroso dengan penelitian ini terletak pada salah satu novel yang diteliti. Suroso meneliti novel *Pasar* karya Kuntowijaya dengan tokoh utama priyayi intelektual yang menanamkan nilai-nilai kepriyayan kepada tokoh bukan priyayi. Penelitian ini mengambil sumber data pada novel *Gadis Tangsi* karya Suparto Brata. Tokoh utamanya Putri Parasi, bangsawan yang menanamkan nilai kepriyayan kepada *wong cilik* bernama Teyi.

Sumbangan penelitian Suroso kepada penelitian ini terletak pada temuan tentang budaya priyayi di dalam menghadapi permasalahan hidup di tengah perkembangan masyarakat yang materialistik dan mengarah ke kapitalistik. Hasil penelitian tersebut memperkuat analisis pada penelitian yang dilaksanakan, yaitu menjawab hegemonibudaya priyayi Jawa untuk berhadapan dengan penguasa di masyarakat yang terepresentasi di dalam novel *PP*, *Ct*, dan *GT*.

Wardani (2009) juga melakukan penelitian tentang budaya priyayi dengan judul *Makna Totalitas dalam Karya Sastra*. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam makna karya sastra melalui pendekatan strukturalisme genetik Lucien Goldmann guna memperoleh makna totalitas novel *PP* dan novel *Jalan Menikung* karya Umar Kayam.

Dalam penelitian Wardani, data utama yang dianalisis adalah novel *PP* dan novel *Jalan Menikung* karya Umar Kayam. Selain itu, data pendukung yang dianalisis adalah kitab *Tripama* karya Mangkunegara IV, kitab *Wulangreh* karya Pakubuwono IV, dan kitab *Candrarini* yang merupakan karya bersama Pakubuwono IX dan Raden Mas Panji Esmubrata. Kitab-kitab ini berkaitan dengan struktur sosial karya sastra. Dari analisis tersebut dihasilkan bahwa makna totalitas dalam dua novel tersebut merupakan kritik Umar Kayam sebagai priyayi cendekiawan terhadap budaya priyayi yang tidak sesuai dengan esensi makna priyayi yang luhur. Secara teoretis, pendekatan strukturalisme genetik merupakan pendekatan yang memadai untuk meneliti karya sastra Indonesia.



Dalam penelitian tersebut, ditemukan pandangan dunia Umar Kayam yang humanisme sosial. Prinsip-prinsip sosial dalam kehidupan masyarakat Jawa pada dasarnya bernilai universal. Pandangan dunia humanisme sosial sesungguhnya dapat diterapkan dalam pembelajaran hidup dan kehidupan priyayi. Namun, ternyata banyak nilai-nilai luhur priyayi telah menyimpang karena banyak kelompok priyayi lebih mengutamakan status sosial, gaya hidup, dan nilai-nilai yang bersifat materi.

Dalam penelitian juga ditemukan bahwa priyayi sejati tidak ditunjukkan, baik melalui keturunan, harta benda berlimpah, maupun gaya hidup. Priyayi merupakan perpaduan yang tidak terpisahkan antara keutamaan intelektual dan keutamaan moral. Kedua, keutamaan ini hasilnya bukan hanya dipergunakan untuk kepentingan sendiri atau golongannya, tetapi diabdikan untuk kepentingan masyarakat (Wardani, 2009: 252).

Persamaan antara penelitian Wardani dengan penelitian ini adalah salah satu objek yang diteliti sama yaitu novel *PP*. Namun, yang membedakan adalah pendekatan yang dilakukan. Wardani menggunakan pendekatan struktural Genetik sedangkan dalam penelitian ini dengan pendekatan budaya, hegemoni, dan nilai-nilai pendidikan karakter.

Sumbangan hasil penelitian Wardani pada penelitian ini adalah memberikan inspirasi dalam analisis pandangan dunia pengarang yang memiliki relevansi dengan kandungan ideologi di dalam novel. Karena itu, kajian ideologi di dalam novel lebih berfokus pada kaitannya dengan ideologi kelompok priyayi dalam kaitannya dengan ideologi kelompok lain di dalam karya sastra. Sumbangan hasil penelitian tersebut

juga memberikan pijakan pada penelitian ini terutama dalam mengungkapkan data pendukung sosiologi pengarang yang tak lepas dari pandangan dunia pengarang dalam merepresentasikan realitas kehidupannya ke dalam karya sastra.

Penelitian budaya dalam novel juga dilakukan oleh Mawadah yang berjudul “Semangat Nasionalisme Tokoh Teyi dalam Novel *Gadis Tangsi* Karya Suparto Brata di antara Masyarakat Multikultural” yang disajikan dalam Seminar HISKI 5-7 Agustus 2009. Dalam penelitian tersebut, Mawadah menemukan bahwa novel *GT* karya Suparto Brata adalah gambaran sebuah kehidupan tangsi yang multikultural pada zaman kolonialisme Belanda. Antara orang Belanda (Barat) dan Jawa bangsawan dan *wong cilik* (Timur) digambarkan dalam relasi kuasa yang terstruktur dan stereotip yang ditanamkan secara turun-temurun sehingga menjadi mitos.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian Mawadah adalah pendekatan poskolonial. Mawadah menganalisis relasi kekuasaan, membandingkan stereotip orang Belanda, Jawa bangsawan, dan Jawa *wong cilik*. Orang Belanda terdeskripsi sebagai orang yang tegas, berdisiplin, berwibawa, dan beradab, Golongan bangsawan terdeskripsi sebagai orang yang sopan santun, tertib, pandai bertatakrama dalam menjalani hidup dan berbahasa halus. Golongan *wong cilik* terdeskripsi sebagai orang yang jorok, berbicara kasar, bertempat tinggal dalam suasana kumuh. Kemudian, Mawadah menganalisis tokoh dengan mengonstruksi mentalitas dan semangat nasionalisme tokoh Teyi.

Teyi, tokoh utama dalam novel *GT* berasal dari kelas rendah memandang relasi kuasa dan stereotip secara positif. Ia membangun jati dirinya menjadi individu

yang nasionalis dengan semangat bekerja keras pada kesempatan yang terbuka lebar. Teyi berhasil menjadi perempuan setaraf dengan bangsawan dan menunjukkan semangatnya menjadi perempuan Jawa Indonesia yang berkepribadian sehingga ia diterima di berbagai golongan multikulturalisme, baik diterima oleh masyarakat Jawa, Sumatra, maupun masyarakat Belanda. Dengan demikian, relasi kuasa dan stereotip tersebut menjadi hal yang fundamental dalam membentuk jati diri individu, seperti yang terjadi pada Teyi.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini, judul novel yang diteliti memiliki kesamaan. Pendekatan yang dilakukan oleh Mawadah adalah pendekatan poskolonial yang dipadu dengan pendekatan hegemoni sebagaimana salah satu pendekatan dalam penelitian ini. Perbedaannya, objek dalam penelitian Mawadah satu judul novel sedangkan objek dalam penelitian ini tiga judul novel warna lokal Jawa. Walaupun begitu, penelitian tersebut memiliki sumbangan yang berharga bagi penelitian ini. Hasil analisis relasi kekuasaan penelitian Mawadah mendukung kompleksitas dan keutuhan analisis dari segi nilai budaya, hegemoni, dan pendidikan karakter.

Dalam penelitian Sutardi, dkk. yang berjudul “The Study of Genetic Structuralism, Gender, and Values Education in Trilogy Novel *Gadis Tangsi* by Suparto Brata” yang dimuat *Online International Interdisciplinary Research Journal* Volume-III Issue Sept-Oct 2013, ditemukan deskripsi priyayi yang digambarkan dalam trilogi novel *GT*. Pendeskripsian terfokus pada priyayi istana yang memiliki pendidikan dan peradaban yang tinggi. Bangsawan pada zaman kolonial adalah

bangsawan feodal *elite* yang memiliki kekuasaan dan pengaruh besar pada masyarakat. Dalam penelitian tersebut juga ditemukan kehidupan priyayi yang berbeda dengan kehidupan orang awam. Priyayi adalah orang-orang yang terpilih dan memiliki kehidupan yang layak di masyarakat pada umumnya. Ajaran priyayi bangsawan (Putri Parasi) yang ditujukan kepada orang awam (Teyi) pada umumnya pengetahuan harmoni, hormat, cara berpakaian, simbol-simbol, bangunan, derajat kepriyayian, dan gaya hidup (Sutardi, dkk, 2013: 496).

Persamaan penelitian Sutardi dengan penelitian ini terletak pada objek penelitian novel *GT*. Perbedaan antara penelitian Sutardi dengan penelitian ini terletak pada pendekatan yang dilakukan. Sutardi meneliti trilogi novel dengan pendekatan struktural genetik. Pendekatan dalam penelitian ini pendekatan budaya, hegemoni, dan nilai-nilai pendidikan sastra. Sumbangan penelitian Sutardi sangat berguna bagi penelitian ini, terutama di dalam mengungkap temuan-temuan budaya priyayi yang diajarkan oleh Putri Parasi kepada orang awam (Teyi) yang dilestarikan pada zaman kolonial.

Selanjutnya, peneliti juga melakukan penelitian awal menemukan ada persamaan tiga pengarang di dalam merepresentasikan budaya priyayi Jawa ke dalam novel-novelnya. Pengarang merepresentasikan priyayi merupakan kelompok sosial yang selalu dihormati oleh masyarakat Jawa sehingga status priyayi menjadi cita-cita bagi setiap orang Jawa. Di dalam menghadapi perkembangan masyarakat, priyayi berdiri di antara ketegangan tradisionalisme dan modernisme. Artinya, priyayi tersebut melaksanakan hegemoni ajaran kejawen yang bersumber dari keraton, dan

ingin mengikuti gaya hidup modernisme untuk menyesuaikan diri dengan penguasa kolonial dan berbuat hal-hal yang pragmatis. Para priyayi pada umumnya kurang taat di dalam menjalankan perintah agama sehingga banyak yang memiliki gaya hidup yang menyimpang dari moral agama padahal priyayi merupakan teladan masyarakat (Santosa, dkk., 2012: 272).

Penelitian awal yang kedua jugadilakukan dengan judul “The Representation of Javanese World In Novels *Para Priyayi*, *Canting*, and *Gadis Tangsi* (Study of Culture and Ideology)” yang dimuat di jurnal *Research Humanities and Social Sciences* vol 3 No.22 2013 menyimpulkan bahwa (1) Masyarakat Jawa, pada umumnya, bercita-cita ingin menjadi priyayi dalam arti orang yang memiliki pangkat atau derajat, kekayaan, kekuasaan atau kemapanan hidup; dan (2) Untuk meraih status kepriyayan, terutama bagi orang awam harus melalui proses bekerja keras, jujur, banyak belajar atau melalui pendidikan, dan mendapat uluran tangan dari orang yang sudah menjadi priyayi. Selain itu, untuk meraih status kepriyayan, orang Jawa masih ada yang percaya kepada mitos wahyu atau *pulung* yang cara mencarinya dengan jalan laku prihatin.(Santosa, dkk, 2013: 158).

Hasil penelitian awal pertama dan awal kedua tersebut dengan hasil penelitian ini memiliki kesamaan subjek dan pendekatan sehingga hasil penelitian awal pertama dan kedua akan melengkapi hasil penelitian ini. Oleh sebab itu, di dalam menganalisis data dalam penelitian ini diharapkan lebih mendalam daripada penelitian awal pertama dan kedua.

Selain penelitian tentang budaya pada novel, penelitian tentang budaya masyarakat Jawa juga dilakukan oleh Suwardi (2011) di dalam disertasinya yang berjudul “Budi Luhur dan budi Pekerti dalam Perspektif Penghayat Kepercayaan Kejawa Masa Kini.” Penelitian tersebut berupaya menjawab permasalahan tentang penyebab nilai-nilai kejawaan menjadi sumber budi luhur yang oleh penghayat dipandang sebagai sakti. Penelusuran jawaban tersebut dilakukan dengan cara interpretatif reflektif untuk menggali, memahami, dan memaknai kehidupan penghayat yang terpola sebagai sistem budaya.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa budi luhur yang berasal dari *babon* mistik kejawaan diperlakukan seolah-olah sebagai agama yang menjawab kegelisahan hati dan menenteramkan batin. Selain itu, budi luhur merupakan wujud resistensi halus terhadap *sesengkeran*, yaitu proses dari agamisasi dari kekuasaan yang selama ini menyimpannya. Penghayat mempertahankan budi luhur sebagai pedoman hidup yang mampu menjawab kegelisahan batin dan sekaligus sebagai acuan amalan pekerti untuk senantiasa *ngudi sejatining becik* (Suwardi, 2011: 194).

Persamaan penelitian Suwardi dengan penelitian ini adalah kedua penelitian meneliti tentang budaya yang menjadi pedoman hidup orang Jawa karena sebagian kelompok penghayat juga terdapat kelompok priyayi. Oleh sebab itu, dimungkinkan budaya yang menjadi pedoman para penghayat memiliki kesamaan dengan budaya kelompok priyayi, baik priyayi bangsawan maupun priyayi intelektual. Perbedaan penelitian Suwardi dengan penelitian ini adalah penelitian Suwardi difokuskan pada budaya yang menjadi pedoman para penghayat kejawaan di wilayah Daerah Istimewa



Yogyakarta dengan segala perilakunya. Penelitian ini difokuskan pada budaya Jawa yang dilakukan priyayi dalam karya sastra yang berjudul *PP*, *Ct*, dan *GT*. Sumbangan penelitian Suwardi pada penelitian ini adalah memperkuat analisis budaya yang dilakukan kelompok priyayi dalam karya sastra.

Hasil penelitian Murtisari yang berjudul “*Some Traditional Javanese Value in NSM: From God to Social Interaction*” yang dimuat pada *International Journal of Indonesian Studies* Vol. 1 2013 disimpulkan bahwa sumber inti keyakinan orang Jawa tradisional kepada Tuhan dikembangkan menjadi perilaku norma hidup sehari-hari. Orang Jawa tradisional percaya bahwa Tuhan merupakan pusat spiritual telah merancang kosmos masyarakat dalam keseimbangan tertentu. Keseimbangan tersebut dipertahankan untuk kepentingan menciptakan perdamaian, hubungan harmonis dengan orang lain dan lingkungan sekitar. Keharmonisan diwujudkan dengan cara berhubungan dengan Tuhan dan kepekaan empati terhadap antarmanusia atau berinteraksi sosial yang dilandasi dengan kesadaran diri sendiri ( Murtisari, 2013: 123). .

Penelitian Murtisari memiliki persamaan fokus dengan penelitian ini yaitu budaya orang Jawa. Akan tetapi, fokus penelitian ini lebih spesifik pada budaya priyayi Jawa di dalam novel sedangkan penelitian Murtisari subjek penelitian pada orang Jawa tradisional pada umumnya. Sumbangan penelitian Murtisari dapat dijadikan salah satu acuan di dalam menganalisis budaya orang Jawa tradisional, khususnya kesadaran priyayi di dalam menghadapi perubahan masyarakat di dalam novel.

Berdasarkan kajian hasil-hasil penelitian yang relevan dengan budaya priyayi Jawa tersebut, dapatlah disimpulkan bahwa pengarang menggambarkan priyayi menerima dan mengeritik budaya Jawa yang berwujud gaya hidup dan berbagai perbuatan yang mereka lakukan. Priyayi berusaha bisa menjadi teladan dan menjunjung tinggi budaya feodalistik. Status priyayi tidak hanya bisa diperoleh melalui pangkat, kekuasaan, dan keturunan, tetapi juga bisa melalui kekayaan. Priyayi percaya bahwa dalam melakukan sesuatu Tuhan selalu bercampur tangan. Sosok priyayi merupakan keterpaduan moral dan intelektual yang memiliki kehidupan yang layak dalam masyarakat. Priyayi berusaha menciptakan harmonisasi kehidupan yang banyak mengambil dari etika wayang dan ajaran budi luhur..

## 2. Penelitian yang Relevan dengan Hegemoni

Penelitian hegemoni dalam karya sastra juga dapat dilihat pada penelitian Mary West yang berjudul *“Article ‘n Paradise Lost’: ‘n Ondersoek swart arbeid en wit ongemak in stedelike Suid-Afrika:: Marlene van Niekerk se kortverhaal “Klein vinger oefening rondom die nosie van hibriditeit” article from Jorunal of Literary Study September 1, 2009 (“Paradise Lost” s Ondersoek)* setelah melahirkan kulit hitam dan ketidaknyamanan seperti kulit putih perkotaan di Suid-Afrika: Marlene van Niekerk Sebuah cerita pendek “Latihan jari kecil sekitar *nosie* dari *hibriteit*” artikel dari *Journal of Literay Studies* 1 September 2009) yang mengungkap hasil penelitian hegemoni kulit putih di Afrika Selatan dan konflik tentang juragan berkulit putih dan juragan berkulit hitam di Kota Madame Hood. Dalam cerita tersebut seakan bangsa Afrika Selatan kehilangan surga karena adanya rejim *apartheid* yang

menimbulkan trauma orang kulit hitam akibat kekerasan sebagaimana kutipan berikut.

*I also show that van Niekerk is vigilant in her interrogation of language and the way in which axioms and truisms (“the tirani of the transparent”) are used to shore up white hegemony, and to render invisible the real place of power (West, 2009:1)*

Makna dalam kutipan tersebut adalah hegemoni sang majikan kulit putih yang diterapkan kepada orang kulit hitam dengan interogasi berupa tirani dan kekerasan fisik maupun kekerasan psikis. Akibatnya, orang kulit hitam di dalam menghadapi orang kulit putih merasa tidak berdaya. Kejadian tersebut merupakan sebagian dari kejadian perilaku kekejaman orang kulit putih lainnya kepada orang kulit hitam.

Persamaan penelitian Dalam “Article ‘n Paradise Lost’: ‘n Ondersoek swart arbeid en wit ongemak in stedelike Suid-Afrika: Marlene van Niekerk se kortverhaal “Klein vingeroefening rondom die nosie van hibriditeit”, dengan penelitian ini adalah sebagai berikut. Penguasa yang menciptakan hegemoni adalah bangsa kulit putih dan kelompok mayoritas yang dihegemoni adalah masyarakat kulit hitam. Hegemoni dalam penelitian ini dibuat oleh kelompok minoritas kulit putih yang menjadi kelompok dominan dalam melaksanakan kekuasaanya kepada masyarakat Jawa selaku kelompok terjajah.

Selain hal tersebut, perbedaannya terletak pada fokus kajian kelompok yang mendapatkan tekanan hegemoni. Kelompok yang mendapatkan tekanan dari kelompok hegemonis adalah kelompok buruh berkulit hitam dengan majikan sebagai

wakil dari kelompok pendukung *apartheid*. Dalam penelitian ini, pihak kelompok yang mendapat tekanan adalah kelompok priyayi yang mendapatkan kontrol ketat dari kelompok hegemonis kulit putih sebagai penguasa negara. Penelitian dalam artikel tersebut berfokus pada reaksi kelompok buruh sebagai kelompok *emergent* yang mendapatkan hegemoni dari majikan sedangkan penelitian ini berfokus pada kelompok priyayi sebagai kelompok residual di dalam menghadapi hegemoni penguasa birokrasi dan penguasa politik.

Sumbangan hasil penelitian tersebut pada penelitian ini adalah bentuk-bentuk hegemoni yang dilakukan oleh orang kulit putih pada penduduk pribumi. Bentuk hegemoni tersebut memberikan dukungan teori bentuk-bentuk hegemoni yang diungkapkan oleh pengarang yang merepresentasikan budaya priyayi untuk menghadapi hegemoni kelompok dominan melalui lukisan tokoh-tokoh kelompok priyayi.

Penelitian yang berhubungan dengan dampak hegemoni revolusi industri yang terdapat pada karya sastra juga dilakukan oleh Diniejko (2006) yang berjudul "*Charles Dickens as Social Commentator and Critic*". Temuan hasil penelitian tersebut adalah Charles Dickens melalui novel-novelnya yang berjudul *A Christmas Carol* (1843), *Hard Times* (1854), dan *The Pickwick Papers* (1837) bertindak sebagai komentator sosial yang mengkritisi tentang ketidakadilan sosial yang disebabkan oleh dampak hegemoni revolusi industri pada zaman pemerintahan Raja Victoria di Inggris. Akibat industrialisasi terjadi pelanggaran ekonomi, moral, lingkungan hidup dan hukum yang dilakukan oleh kelas penguasa.

Menurut temuan Diniejko, Dickens percaya bahwa sastra, khususnya novel memiliki potensi etika dan politik untuk dijadikan batu loncatan untuk berdialog tentang reformasi moral dan sosial. Dickens menggunakan novel sebagai gudang kesadaran sosial. Dickens sebagai novelis memiliki kontribusi yang signifikan terhadap munculnya opini publik yang menekan kebijakan kepada pihak penguasa di Inggris pada zamannya. Hal itu sejalan dengan kutipan berikut.

*Dickens contributed significantly to the emergence of public opinion which was gaining an increasing influence on the decisions of the authorities . Indirectly , he contributed to series of legal reforms, including the abolition of the inhumane imprisonment for debts, purification of the Magistrates' courts, a better management of criminal prisons, and the restriction of the capital punishment. (Diniejko and D. Litt, 2006: 1)*

Dalam kutipan tersebut, dinyatakan bahwa Dickens memiliki pengaruh yang besar terhadap penguasa yang berhubungan dengan reformasi hukum perbaikan perlakuan pada penghuni penjara yang tidak manusiawi menjadi lebih manusiawi, termasuk pembatasan hukuman mati. Keadaan tersebut menandakan bahwa novel juga memiliki pengaruh praktis untuk memperbaiki kondisi masyarakatnya dan sastra memiliki fungsi humanistik.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Diniejko dengan penelitian ini adalah pendekatan hegemoni. Subjek yang diteliti memiliki kesamaan fokus kajian kelompok bangsawan borjuis kelas penguasa (kelompok priyayi ) dan masyarakat proletar(kelompok *wong cilik*).

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Diniejko dengan penelitian ini terletak pada fokus kelompok masyarakat yang dihadapi. Penelitian Diniejko memiliki fokus Charles Dickens di dalam menyuarakan hati nuraninya untuk melawan industrialisasi di Inggris yang membuat penderitaan kelas proletar, tetapi memuliakan bangsawan dan kelas borjuis. Akan tetapi, penelitian ini berfokus pada sejauhmana nilai-nilai budaya masyarakat priyayi dalam menghadapi hegemoni penguasa atau Pemerintah Hindia Belanda dalam novel *PP*, *Ct*, dan *GT*.

Sumbangan penelitian Diniejko pada penelitian ini sangat signifikan. Temuan-temuan hasil penelitian tersebut menunjukkan fungsi sastrawan sebagai komentator yang mengkritisi pemerintahan zamannya di dalam mewakili kepentingan golongannya. Temuan tersebut memperkuat teori analisis sosiologis hegemonik yang digunakan untuk menjawab hegemoni yang dihadapi kelompok priyayi dalam novel *PP*, *Ct*, dan *GT*.

Penelitian emansipasi wanita di dalam menghadapi hegemoni patriarki terdapat pada disertasi Sarmidi (2009) yang berjudul “Representasi Pergeseran Moralitas dalam Karya Novelis Perempuan Indonesia” Sarmidi menyimpulkan bahwa novelis perempuan Indonesia pada umumnya merepresentasikan moralitas secara kritis yang diorientasikan pada emansipasi perempuan. Secara ideologis orientasi moralitas, tata norma, dan tata nilai, citra moral dan identitas dalam karya novel perempuan Indonesia bergeser dari keinsyafan patriarkis (1930-an) berlanjut kegamangan patriarkis (1970-an), dan akhirnya pembebasan patriarkis (1990 sampai dengan tahun 2000-an).



Pergeseran tersebut mengikuti pola, gaya, dan sikap dalam konteks sosial budaya, dan terakhir berpengaruh terhadap gaya pengungkapan teks yang pada teks karya novel perempuan Indonesia tahun 1930-an bersifat patuh pada ungkapan-ungkapan tabu. Pada tahun 1970-an, pengarang mulai berani melanggar hal-hal tabu dalam merepresentasikan teks walaupun diungkapkan secara tidak langsung. Akan tetapi, teks tahun 1990-2000-an lebih direpresentasikan secara tegas, jelas, kritis, terbuka, bebas dan melanggar segala hal yang bersifat tabu dengan cara pengungkapan teks yang lebih cerdas, langsung, berani, vulgar, dan berdaya.

Persamaan penelitian Sarmidi dengan penelitian ini adalah membahas representasi novel. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian. Sarmidi dalam disertasinya berfokus pada novelis Indonesia perempuan dalam merepresentasikan pergeseran moralitas tokoh perempuan, tetapi penelitian berfokus pada budaya ini priyayi di dalam menghadapi hegemoni yang dilukiskan dalam novel *PP*, *Ct*, dan *GT*. Penelitian Sarmidi lebih berorientasi pada persamaan novelis perempuan Indonesia dalam merepresentasikan perilaku dan pandangan hidup tokoh dalam menyikapi tokoh perempuan, tetapi penelitian yang akan dilakukan lebih berorientasi pada keragaman pengarang dalam merepresentasikan hegemoni, budaya priyayi, dan pendidikan karakter dalam novel. Sumbangan hasil penelitian Gatot Sarmidi memberikan inspirasi tentang representasi budaya perempuan priyayi yang terdapat di dalam novel *PP*, *Ct*, dan *GT*.

Dalam disertasi Pasca Sarjana Universitas Gadjahmada tahun 2006 yang berjudul “Hegemoni dalam Cerita *Silat Nagasasra* dan *Sabuk Inten*”, Supriyanto

mengkaji cerita bersambung S.H. Mintarja yang berjudul “Hegemoni dalam Cerita Silat *Nagasasra dan Sabuk Inten*” dengan analisis hegemoni Gramsci dengan memfokuskan pada mitos kesaktian sebagai alat hegemoni untuk menghidupkan ideologi feodalisme. Dalam disertasi tersebut, Supriyanto (2006:313) menyimpulkan bahwa

pada tataran teks ideologi feodalisme merupakan ideologi dominan. Melalui praktek negosiasi dan relasi ideologis, ideologi dominan diperjuangkan menjadi ideologi hegemonik. Dalam tataran teks, ideologi kapitalisme menempati posisi resistensi. Di luar teks, ideologi hegemonik adalah ideologi kapitalisme. Praktek negosiasi dan relasi ideologi juga terjadi di luar teks. Dalam memperjuangkan hegemoni, ideologi kapitalisme melakukan praktek relasi (berafiliasi sementara) dengan ideologi feodalisme supaya dapat diterima dalam masyarakat. NSSI harus melakukan praktik negosiasi dan relasi ideologis. Melalui mitos, negosiasi dan relasi ideologis dapat diterima. Ini berarti sastra dapat menjadi pop ketika melakukan praktik negosiasi dan relasi ideologis (Supriyanto, 2006:313).

Temuan hasil penelitian Supriyanto adalah cerita *Nagasasra Sabuk dan Inten* memiliki tataran dalam cerita dan tataran di luar cerita. Pada tataran di dalam cerita menunjukkan bahwa ideologi feodalisme yang dominan menjadi ideologi hegemoni dengan cara negosiasi dan relasi sehingga menginternal pada rakyat. Pada tataran di luar cerita, *Nagasasra dan Sabuk Inten* terpengaruh oleh ideologi kapitalisme yang berelasi dengan ideologi feodalisme dengan menampilkan mitos kesaktian yang

sesuai dengan selera masyarakat Jawa sehingga cerita bersambung tersebut disukai oleh pembaca.

Pesamaan disertasi tersebut dengan penelitian ini terletak pada tinjauan hegemoni dengan analisis Gramsci pada novel. Perbedaan penelitian Supriyanto dengan penelitian ini terletak pada fokus. Penelitian Supriyanto berfokus pada ideologi dominan feodalisme menginternal pada masyarakat Jawa untuk menjadi ideologi hegemoni dengan memandang teks cerita sebagai alat hegemoni ideologi yang diresepsi oleh pembaca. Akan tetapi, penelitian ini berfokus pada budaya priyayi di dalam menghadapi hegemoni dari kelompok dominan dalam novel. Perbedaan yang lain terletak pada satu pendekatan yang dialami. Supriyanto mendalami cerita fiksi dari satu aspek hegemoni sedangkan di dalam penelitian ini, pembahasan difokuskan pada tiga aspek yaitu aspek budaya, hegemoni dan nilai-nilai pendidikan karakter. Penelitian ini menyoroti tiga cerita fiksi dari tiga pengarang yang berbeda sedangkan penelitian Supriyanto menyoroti satu cerita fiksi dengan satu pengarang.

Disertasi Supriyanto menyoroti satu judul cerita fiksi dan satu pengarang tersebut memiliki kedalaman analisis. Disertasi tersebut juga memberikan sumbangan yang signifikan pada pembahasan tiga novel yang diteliti. Temuan-temuan dan teori yang digunakan memberikan inspirasi bagi peneliti untuk mengembangkan analisis hegemoni yang dipadu dengan analisis budaya dan nilai-nilai pendidikan karakter.

Penelitian tentang hegemoni juga dilakukan oleh Nurhadi pada Artikel nomor 25 Jurnal *Litera* FBS UNY edisi Juli 2004; kode: analisis hegemoni. Artikel tersebut berjudul *Iblis Tidak Pernah Mati Karya Seno Gumira Ajidarma: Analisis Hegemoni Gramsci*. Tujuan penelitian tersebut untuk mendeskripsikan formasi ideologi dalam *Iblis Tidak Pernah Mati*, formasi ideologi dalam masyarakat, dan hubungan historis *Iblis Tidak Pernah Mati* sebagai bagian dari negosiasi ideologi yang terjadi dalam masyarakat. Di dalam menganalisis data, peneliti menggunakan teori hegemoni.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam *Iblis Tidak Pernah Mati* terdapat sejumlah ideologi dominan yaitu kapitalisme, otoritarianisme, dan militerisme yang berhadapan dengan sejumlah ideologi *subaltern* yaitu sosialisme, feodalisme, rasialisme, vandalisme, dan anarkhisme. Selain itu, juga terdapat ideologi lain yang berperan sebagai negosiator yaitu demokrasi dan humanisme. Sebagai intelektual organik dari masyarakat yang kapitalistik, Seno Gumira Ajidarma melalui *Iblis Tidak Pernah Mati* telah melakukan negosiasi ideologi kapitalisme dengan ideologi lainnya yaitu sosialisme, demokrasi, dan humanisme.

*Iblis Tak Pernah Mati* merupakan otokritik dalam wacana dominan kapitalistik. Kritik tentang penyimpangan-penyimpangan yang terungkap dalam antologi *Iblis Tak Pernah Mati* ditujukan kepada pemilihan jenis kelompok kapitalisme. Ternyata pengarang cenderung memilih alternatif kapitalisme sosialis, demokratis, dan humanis. Kapitalisme yang diperjuangkan adalah kapitalisme yang tidak otoriter dan tidak militeristik sehingga tidak berakibat vandalisme dan anarkhis.

Dengan demikian, kapitalisme akan lebih memperoleh dukungan melalui konsensus kelompok subordinat lainnya. Seno Gumira Ajidarma merupakan pengarang kapitalis yang secara tidak langsung terjebak ke dalam kelompok penguasa yang berideologi kapitalisme yang juga termasuk dalam kriteria sebagai pengarang kesusasteraan yang hegemonik (Nurhadi, 2004: 10).

Persamaan hasil penelitian Nurhadi dengan penelitian ini terletak pada pendekatan hegemoni. Perbedaan hasil penelitian Nurhadi dengan penelitian ini adalah sumber data penelitian Nurhadi adalah antologi cerita pendek sedangkan sumber data dalam penelitian ini adalah novel *PP*, *Ct*, dan *GT*. Selain itu, perbedaan juga terletak pada penelitian Nurhadi menganalisis hegemoni ideologi tokoh, sedangkan penelitian ini merupakan analisis hegemoni kelompok priyayi Jawa terhadap kelompok lain. Sumbangan penelitian Nurhadi merupakan salah satu acuan yang dapat mendukung penerapan teori hegemoni dalam penelitian ini.

Wijakangka (2008) melaporkan hasil penelitiannya berjudul “Analisis Hegemoni Kekuasaan dalam Novel *Pabrik Karya* Putu Wijaya” yang termuat dalam Jurnal *Artikulasi* Volume 5 Nomor 1 Februari 2008. Penelitian Wijakangka merupakan hasil penelaahan deskriptif analisis hegemoni kekuasaan dalam novel *Pabrik karya* Putu Wijaya yang tercermin melalui hubungan antartokoh. Permasalahan yang diteliti adalah (1) deskripsi bentuk kekuasaan *coercive power* dan *insentive power* pada novel *Pabrik karya* Putu Wijaya; (2) fungsi kekuasaan *coercive power* dan *insentive power* pada novel *Pabrik karya* Putu Wijaya; (3) makna kekuasaan *coercive power* dan *insentive power* pada novel *Pabrik karya* Putu Wijaya.

Temuan yang dihasilkan dalam penelitian tersebut adalah bentuk kekuasaan tergambar melalui tokoh Tirtoatmojo dan Tokoh Joni sebagai berikut. 1) Bentuk *coercive power*, berupa pemaksaan bekerja di luar jam kerja kepada para pembantu, mengintimidasi tokoh Joni, mengancam buruh, peraturan tertulis, penyalahgunaan hukum. Selanjutnya *insentive power*, dapat dipahami melalui imbalan tidak seimbang dengan pengorbanan para buruh, iming-iming imbalan, imbalan promosi (kenaikan kedudukan), tunjangan yang berlipat, menuntut imbalan, meningkatkan imbalan, dan janji imbalan kepada buruh. Bentuk *coercive power* dan *insentive power* berpengaruh terhadap kehidupan tokoh dalam novel *Pabrik* karya Putu Wijaya. 2) Fungsi *coercive power*, berupa menciptakan ketakutan, ancaman pemecatan, penerapan disiplin, mencegah tindak kekerasan sedangkan fungsi *insentive power*, berupa menciptakan kepatuhan dan kesetiaan, mengendalikan para buruh agar disiplin, membujuk, pemberian janji, mengalihkan perhatian, mengantisipasi ketidakefektifan kerja dan menciptakan rasa tanggung jawab kepada buruh (Widakangka, 2008: 209).

Hasil penelitian Widakangka tersebut memiliki sumbangan yang sangat besar pada penelitian ini yaitu sumbangan yang berupa kedalaman Widakangka di dalam menganalisis bermacam-macam bentuk hegemoni. Oleh karenanya, hasil penelitian tersebut juga memperkuat untuk menganalisis tiga novel yang diteliti.

Silaen dalam hasil penelitian “*The ‘Culture System’ in Dutch Indonesia 1830-1870: How Rawls’s Original Position Ethics were Violated*” yang dimuat pada *Research Online University of Wollongong* 6(1) December 2006 meneliti pengaruh kolonialisme pada kehidupan masyarakat Indonesia. Ia menyimpulkan bahwa sistem



budaya yang dilakukan oleh Pemerintah Hindia Belanda membawa banyak perubahan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat Indonesia pada abad XIX. Budaya kolektif berbasis barter kerajaan berubah menjadi hegemoni Pemerintah Hindia Belanda yang banyak merugikan petani akibat monopoli yang dilakukan oleh *NHM (Nederlandsche Handel Maatschappij)*. Konsekuensi dari sistem budaya yang dilakukan, selain membawa keuntungan ekonomi pemerintah, juga mempromosikan ideologi ketidaksetaraan, pemisahan pendidikan berdasarkan status sosial dan ras, dan akses perbedaan perlakuan ras dalam menghargai pekerjaan. Kebijakan Pemerintah Hindia Belanda tersebut melanggar standar moral John Rawls (Silaen, 2006: 67).

Hasil penelitian Silaen tersebut dengan penelitian ini memiliki kesamaan permasalahan yaitu sistem budaya atau hegemoni yang dilakukan oleh penjajah kepada masyarakat Indonesia. Kemudian, perbedaan penelitian Silaen dengan penelitian ini adalah objek yang diteliti oleh Silaen berfokus pada sejarah kebijakan penjajah kepada koloninya yaitu masyarakat Indonesia yang bersifat faktual. Objek penelitian ini adalah novel sebagai karya fiksi yang dipandang sebagai representasi keadaan masyarakatnya. Oleh sebab itu, sumbangan hasil penelitian yang dilakukan oleh Silaen sebagai referensi untuk memberikan gambaran yang lebih konkret dan faktual pada pendeskripsian dan analisis data.

Mattei di dalam artikel yang berjudul “*A Theory of Imperial Law: A Study on U.S. Hegemony and the Latin Resistance*” dalam *Indiana Journal of Global Legal Studies* Vol. 10 2003 mengatakan bahwa model hukum penjajah yang diterapkan

kepada koloninya ada 3. Model pertama adalah langsung/aturan imperialistik kolonial atau pengenaan pola hukum dengan kekuatan militer karena terjadi masa penaklukan militer. Model kedua sebagai pemaksaan dengan tawar menawar bagian pemerasan dari penguasa agar hukum sesuai dengan kehendak penguasa. Model ketiga, penguasa membuat kekaguman dengan propaganda kepada orang yang dikuasai untuk mengarahkan penerimaan peraturan.

Kesamaan hasil pemikiran Mattei dengan penelitian ini terletak pada analisis hegemoni. Perbedaan hasil pemikiran Mattei dengan penelitian ini terletak pada objek analisis. Mattei menganalisis hegemoni yang dilakukan oleh Amerika Serikat kepada negara-negara Amerika Latin. Objek yang dianalisis dalam penelitian ini adalah analisis hegemoni dalam fakta fiksi. Hasil pemikiran Mattei tersebut relevan dengan hasil penelitian ini, terutama di dalam mendeskripsikan bentuk hegemoni yang dilakukan oleh kelompok penguasa.

Penelitian yang hampir serupa juga dilakukan oleh Saddhono dan Supeni yang berjudul *“The Role Dutch Colonialism in the Political Life of Mataram Dynasty: A Case Study of the Manuscript of Babad Tanah Jawi”* dalam *Asian Social Science* Vol. 10, No. 15, 2014. Temuan dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa *Babad Tanah Jawi* merupakan cerita sejarah asal-usul raja-raja Mataram sebagai keturunan dewa dan Nabi Adam. Peran Belanda dalam kehidupan politik dinasti Mataram dimulai pada era Susuhunan Amangkurat II kemudian kemitraan dilanjutkan oleh raja-raja Mataram berikutnya. Penjajah mengendalikan Mataram terus-menerus.

*Babad Tanah Jawi* dianggap memiliki fungsi untuk melegitimasi kekuasaan Kerajaan Mataram. Naskah ini mengandung anggapan bahwa Kerajaan Mataram sebagai hegemoni resmi penguasa di Jawa keturunan Majapahit. *Babad Tanah Jawi* tidak boleh dianggap sebagai sejarah, tetapi harus dihargai sebagai pola pikir Jawa dan pendekatan dalam memuji raja dan tanah air mereka untuk orang Jawa. Penafsiran simbol-simbol lebih berharga daripada hanya membaca secara faktual.

Kesamaan penelitian yang dilakukan oleh Saddhono dan Supeni dengan penelitian ini terletak pada pendekatan hegemoni yang dilakukan oleh penjajah kepada kelompok bangsawan. Kemudian, bangsawan juga melakukan hegemoni kepada masyarakat pada zaman Pemerintah Hindia Belanda. Perbedaan penelitian tersebut, dengan penelitian ini adalah objek *setting* waktu yang berhubungan dengan peran Belanda pada awal kolonial, tetapi *setting* waktu penelitian ini adalah pada pascakolonial pada karya sastra yang berbeda. Namun, substansi dari peran penjajah sebagai kelompok hegemonis kepada kelompok terjajah dalam penelitian Saddhono dan Supeni memberikan arah konkret pada proses analisis hegemoni pada tiga novel *PP*, *Ct*, dan *GT*.

Penelitian Ahmadi yang berjudul “*Cultural Hegemony in Charles Dickens A Tale of Two Cities*” dalam *International Journal of Literature and Arts* July 20, 2014 mendeskripsikan tanda-tanda hegemoni budaya dan peristiwa yang mengkhawatirkan akibat Revolusi Perancis dalam novel Charles Dickens. Banyak pelanggaran bangsawan yang dihukum oleh pemberontak yang memenangkan revolusi Perancis. Bahkan, raja pun dihukum. Dickens juga menunjukkan cita-cita aristokrasi

dengan menyoroti hegemoni budaya Perancis dan Inggris. Dalam penelitian tersebut, disimpulkan bahwa sebagian besar karakter novel merupakan kekuasaan politik kaum bangsawan yang memaksakan budaya mereka dan keyakinan kepada rakyat jelata untuk menjaga tradisi aristokrasi mereka (Ahmadi, 2014: 101-102).

Penelitian Ahmadi tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian ini dari segi permasalahan, pendekatan, dan jenis novel yang diteliti. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah kelompok hegemoni yang terdapat dalam novel *Tale of Two Cities* adalah para bangsawan sedangkan kelompok hegemoni dalam penelitian ini adalah penjajah, bangsawan, dan priyayi. Oleh sebab itu, hasil penelitian Ahmadi merupakan salah satu acuan untuk memperkuat hasil analisis hegemoni pada penelitian ini.

Berdasarkan berbagai hasil penelitian yang relevan dengan hegemoni tersebut, dapatlah disimpulkan bahwa hegemoni yang terdapat di dalam novel adalah hegemoni yang dilakukan oleh penjajah. Novel digunakan oleh pengarang untuk menyadarkan masyarakat sehingga mampu mempengaruhi penguasa hegemonik karena memiliki potensi etika dan politik untuk mengubah masyarakat. Sastrawan yang mewakili golongannya berfungsi sebagai komentator ideologi feodalisme menjadi ideologi hegemonik. Ideologi kapitalisme berkorelasi dengan ideologi feodalisme sehingga menginternal menjadi ideologi masyarakat. Ideologi dominan (kapitalisme) berhadapan dengan ideologi subaltern (feodalisme). Bentuk hegemoni yang dilakukan adalah mengancam, pemberian hak yang tak seimbang dengan beban kewajiban, menciptakan ketakutan, kesetiaan, dan kepatuhan. Kelompok hegemonik

mempromosikan ideologi ketidaksetaraan pendidikan, ras, dan pekerjaan. Modal yang digunakan oleh kelompok hegemonik adalah kekuatan aparat untuk memaksakan kehendak dan menciptakan kekaguman. Karya sastra sebagai alat legitimasi. Karena itu, karakter novel menggambarkan pemaksaan ideologi feodalisme yang bisa diterima dan diyakini oleh masyarakat agar tradisi bangsawan juga bisa menjadi tradisi masyarakat.

### 3. Penelitian yang Relevan dengan Nilai Pendidikan Karakter

Indede (2009) melaporkan penelitian yang berjudul “*The pragmatic Kiswahili Political Discourse*” yang dimuat pada *Journal of Pan African studies* volume 2, nomor 8, Maret 2009 dengan hasil penelitian antara lain sebagai berikut. Penelitian tersebut mencoba menerapkan analisis pragmatik sastra wacana politik *Kiswahili*. Spesifik, *Sauti ya sampeli* diambil dari teks-teks puitis; *Chembe cha Moyo* oleh Alamin Mazrui (1988), *Wahusika ya Dhiki* oleh Abdilatif Abdala (1973) dan *Jicho la Ndani* oleh Said Ahmed Mohamed (2002). Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa pendekatan pragmatik sastra dengan hasil pemahaman dan interpretasinya memerlukan pemahaman dan apresiasi historis, kondisi sosial, dan faktor-faktor ideologis yang masuk dalam karya sastra.

Dampak pragmatis karya sastra itu mencakup keseluruhan teksitu, dikombinasikan dengan aspek emosional, intelektual dan imajinatif sastrawan. Menurut Indede, Kiswahili yang telah menulis isu-isu yang menyentuh semangat dan keinginan sastrawan, aspirasi politik, kebebasan, keadilan dan perubahan sosial yang berarti bagi diri mereka sendiri dan komunitas sosial mereka. Indede juga

mendeteksi permohonan tegas untuk keadilan dan harapan yang terkandung dalam bahasa puitis dan panggilan penyair untuk reformasi sosial. Indede selaku peneliti juga menunjukkan adanya kejelasan yang saling menguntungkan melalui kepekaan penyair yang menyerukan solidaritas secara keras. Solidaritas itu diserukan untuk mengatasi stereotip negara yang menyebabkan absurditas dalam masyarakat demokratis. Kesimpulan hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak mudah untuk membangun makna teks karena teks yang dibangun tidak hanya dari ambiguitas teks, tetapi dari konteks konstruksi dari penulis yang berhubungan dengan pengetahuan, keyakinan, pengalaman dan asumsi tentang dunia mereka dan dunia fiksi.

Persamaan dengan penelitian ini yaitu pembahasan nilai-nilai ideologis yang terdapat dalam karya sastra dengan pendekatan pragmatik yang berfokus pada nilai-nilai pendidikan. Perbedaannya, terletak pada objek penelitian Indede adalah teks-teks puisi, objek penelitian ini adalah novel dari tiga pengarang yang berbeda sehingga dimungkinkan masing-masing novel memiliki nilai ideologis yang berbeda.

Sumbangan penelitian yang dilakukan oleh Indede kepada penelitian ini berhubungan dengan aspek nilai-nilai pragmatik yang terdapat di dalam karya sastra. Penelitian tersebut memberikan pijakan lebih kuat bagi peneliti untuk mengembangkan teori yang digunakan untuk menganalisis novel dari aspek sosiologis pembacaan kode-kode yang dimiliki pembaca.

Penelitian nilai-nilai pendidikan dalam novel juga dapat dilihat pada hasil penelitian Wright (2010) yang berjudul "Resepsi Awal Bukit Fool" pada jurnal



*Humaniora dan pendidikan Standar Paket* Web 22 Mei 2010. Novel yang diteliti tersebut merupakan novel yang paling banyak dibaca anak-anak sekolah di Afrika Selatan yang ditulis oleh R.L. Peteni dalam bahasa Inggris. Dalam novel tersebut, diceritakan sebuah desa di bawah Hlubi Bukit Fools dan dua buah suku yang hidup selalu bermusuhan yaitu suku Hlubi dari Capulets dan suku desa Tembu yang dua suku tersebut dibelah oleh Sungai Montagues Xesi.

Zuziwe, seorang gadis Hlubi jatuh cinta dengan Bhuqa, seorang prajurit Tembu terkemuka. Tunangannya seorang petani Hlubi makmur dan jauh lebih tua dari Zuziwe yang bangga diterima sebagai pelamar oleh keluarga Zuziwe itu, mencoba mengakhiri aliansi. Hal ini menimbulkan bentrokan suku yang mengakibatkan saudara Zuziwe yang bernama Tybalt Ciskei terbunuh oleh Bhuqa. Zuziwe hamil oleh Bhuqa sehingga dikutuk oleh sukunya. Bhuqa mendapatkan tekanan dari suku dan keluarganya dipaksa untuk meninggalkan Zuziwe.

Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa novel tersebut didaktik dan menarik perhatian pembaca. Novel tersebut mengungkapkan perang, otoritarianisme, kebencian, unsur nasib, dan kekejaman hidup. Peristiwa dalam novel tersebut berhubungan erat dengan realitas politik, sosial, dan budaya pada masyarakat pembaca yang sedang dilanda kebingungan *factual tragedy* faksionalisme, kesukuan, dan politik *apartheid*. Novel juga bercerita dengan tema yang sederhana dan cukup memikat pembaca.

Persamaan hasil penelitian Wright dengan penelitian ini terletak pada kajian nilai pendidikan. Perbedaan terletak pada fokus penelitian. Fokus penelitian Wright adalah konflik antarsuku sedangkan penelitian ini terletak pada nilai pendidikan dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi tokoh dalam mengubah status sosial rendah menjadi status sosial yang lebih tinggi.

Hasil penelitian tersebut memberikan sumbangan yang signifikan pada penelitian ini. Teori-teori yang digunakan dalam penelitian tersebut mendukung teori yang digunakan peneliti untuk menganalisis novel *PP*, *Ct*, dan *GT* dari aspek nilai pendidikan karakter.

Triana juga meneliti sosiopragmatika sastra dengan artikel “Nilai-Nilai Budaya Minangkabau dalam Karya HAMKA : Analisis Sosiopragmatik terhadap Roman *Dibawah Lindungan Ka'bah*” dimuat pada *Jurnal Pusat Kajian Budaya Islam* 11 Februari 2012. Dalam artikel tersebut Triana meneliti novel *Di Bawah Lindungan Kabah* karya Hamka melalui pendekatan sosiopragmatik yang memandang bahwa selain roman tersebut dicipta dengan bentuk satuan-satuan linguistik juga berisi kesantunan yang sesuai dengan adat Minangkabau. Karya sastra merupakan hasil karya yang dibangun melalui kemampuan pengarang memilih dan menyusun kata, di samping kemampuan merangkai peristiwa sebagai cermin realitas sosiobudaya tempat karya itu dihasilkan. Oleh sebab itu, karya tersebut dapat menunjukkan ketinggiankecakapan dan kepiawaian mengarang pengarangnya (Triana, 2012: 1). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa ada nilai kesantunan dan nilai religius

yang ditonjolkan oleh Hamka pada roman *Di bawah Lindungan Kabah* sebagai berikut.

Hamka bukan sekedar memilih dan menjalin kata. Akan tetapi, Hamka mencoba mengungkapkan nilai-nilai budaya Minangkabau melalui penggambaran dilematik tradisi yang kadang kala mesti mengorbankan perasaan dan naluri kemanusiaan. Ada dua nilai yang ditonjolkan oleh Hamka pada roman *Di Bawah Lindungan Kabah* dalam mengkonstruksi perilakunya di setiap aspek-aspek kehidupan. Dua nilai itu ialah nilai kesantunan dan nilai religius. Nilai-nilai tersebut dikemas Hamka dalam dalam tuturan yang penuh implikatur. Justru itu, pemahaman akan maksud tuturan hanya akan dapat dijelaskan secara tepat dengan memahami konteksnya, baik konteks gramatikal, situasional maupun sosial budaya. Justru itu, dengan analisis sosial pragmatik dapat dijelaskan nilai-nilai budaya yang tersirat di balik penggunaan bahasa Hamka yang sesungguhnya menjadi unsur utama dalam membangun perilaku sosial etnik Minangkabau. (Triana, 2012: 7).

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Triana dengan penelitian ini adalah pendeskripsian aspek-aspek budaya yang terkandung di dalam prosa fiksi. Perbedaannya, objek penelitian yang dilakukan oleh Triana adalah roman yang berlatar budaya Minangkabau sedangkan objek penelitian ini adalah novel yang berlatar belakang budaya Jawa.

Sumbangan penelitian tersebut terhadap penelitian ini dapat menginspirasi peneliti untuk menggali budaya yang mengandung nilai pendidikan, yaitu nilai-nilai

kesantunan yang memperkuat teori yang diterapkan dalam penelitian ini. Hasil penelitian Triana menunjukkan bahwa representasi nilai-nilai budaya Minangkabau yang terkandung di dalam roman *Di Bawah Lindungan Kabah* menunjukkan realitas kesantunan adat Minangkabau yang direpresentasikan dengan tokoh Hamid. Watak tokoh tersebut direpresentasikan setiap hari dengan hal-hal yang berhubungan dengan keagamaan dan nilai-nilai kesalihan seseorang yang meneladani para tokoh orang suci.

Penelitian yang dilakukan oleh Jadhav dan Mothe yang berjudul “*Pragmatic Analysis of Abuses in Coolie*” dalam *The Criterion: An International Journal in English* Volume 1 Issue III December 2010 menganalisis novel *Coolie* yang dicipta oleh Mulk Raj Anand. Novel tersebut dibutuhkan para pembaca dengan kelompok usia, kasta, kelas, pekerjaan dan profesi yang berbeda yang memiliki variasi bahasa dan penggunaan register.

Temuan dalam penelitian tersebut adalah penulis novel sengaja menciptakan beberapa karakter tertentu yang menjadi penerima pelanggaran verbal. Pelanggaran tersebut didominasi oleh kelompok masyarakat India berkasta tinggi sehingga isi novel tersebut mencerminkan deskriminasi sistem kelas. Dalam novel tersebut, ditunjukkan kontras elemen kaya-miskin, orang kota-orang desa, Inggris-India yang menunjukkan adanya pelanggaran prinsip-prinsip pragmatik. Hal itu tercermin pada tokoh Munoo yang diberi kualifikasi keledai oleh pamannya. Setiap hari pamannya

marah-marah dengan kata-kata kasar. Dalam menghadapi kehidupan, Munoo selalu sabar meskipun kecewaan dan kesengsaraan yang datang tidak hanya dari keluarganya, tetapi juga dari majikannya yang selalu menindas melalui pekerjaannya. Paman dan majikannya sering bersikap kasar dan memanggil dirinya sebagai binatang.

Persaman penelitian Jadhav dan Mothe (2010) dengan penelitian ini adalah objek yang diteliti sama yaitu novel yang dengan tema pertentangan kelas sosial yaitu kasta tinggi dan kasta rendah dalam novel *Coolie* dan dalam penelitian ini pertentangan antara kelas priyayi dan kelas *wong cilik* dalam novel *PP*, *Ct*, dan *GT*. Perbedaan penelitian Jadhav dan Mothe dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitian pada novel *Coolie* adalah tindak tutur yang mencerminkan realitas kelas sosial masyarakat India, tetapi fokus pada penelitian ini adalah nilai-nilai pendidikan kelompok priyayi yang direspons oleh pembaca riil dan pembaca ahli. Sumbangan penelitian Jadhav dan Mothe (2010) terhadap penelitian ini adalah memberikan dukungan untuk mempertajam analisis novel *PP*, *Ct*, dan *GT* yang sedang diteliti.

Selanjutnya, penelitian yang berkaitan dengan nilai-nilai pendidikan dalam karya sastra juga dilakukan oleh Muslich, K.S., dkk (2006: 139). Temuan yang dihasilkan dalam ajaran *Serat Wulang Brata* karya Sultan Hamengkubuwono V adalah adanya keteladanan wujud bakti kepada Tuhan, raja, orang tua, dan sesama. Ajaran berbakti kepada Tuhan dilakukan dengan jalan melaksanakan perintah-Nya

dan meninggalkan larangan-Nya, giat bekerja dan selalu bersyukur atas segala pemberian-Nya, baik yang menyebabkan suka maupun duka. Ajaran berbakti kepada raja dilakukan dengan menunjukkan kesetiaan, kejujuran, dan selalu mengabdikan. Ajaran berbakti kepada orang tua dilakukan dengan menghormati dan menyayangnya. Ajaran berbakti kepada sesama diwujudkan dengan sikap saling menghargai, rukun, tidak sombong, dan murah hati.

Persamaan antara penelitian Muslich K.S., dkk. dengan penelitian ini ialah bahwa kedua-duanya meneliti karya sastra dari segi nilai pendidikan. Perbedaannya, objek penelitian oleh Muslich K.S., dkk. adalah *Serat Wulang Brata* karya Sultan Hamengkubuwono V berbentuk tembang atau puisi Jawa sedangkan objek penelitian ini adalah novel modern yang berbentuk prosa fiksi. Sumbangan penelitian Muslich, dkk terhadap penelitian ini sangat relevan digunakan sebagai acuan untuk menganalisis nilai-nilai pendidikan karakter priyayi Jawa dalam novel *PP*, *Ct*, dan *GT*.

Hartini, dkk. dalam penelitian yang berjudul “*Character Education Values of Female Characters in Serat Candra Rini*” dalam Jurnal Melayu Jilid 12(1) Juni 2014 menemukan fungsi nilai-nilai pendidikan karakter. Hartini, dkk. menyatakan bahwa dengan mengetahui latar belakang kehidupan masyarakat Jawa pada masa lalu berkaitan dengan mata pencaharian, pola pemikiran, serta sikap hidupnya di dalam



karya sastra dapat dijadikan sebagai sarana pendidikan karakter (Hartini dkk., 2014: 44).

Hasil penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan hasil penelitian ini yaitu menyoroti pendidikan karakter sebuah karya sastra. Perbedaan hasil penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada jenis fiksi yang diteliti. Objek penelitian Hartini fiksi kuno *Serat Candra Rini* sedangkan objek penelitian ini adalah novel modern. Walaupun begitu, hasil penelitian Hartini bisa dijadikan referensi untuk membahas nilai-nilai pendidikan karakter pada tokoh perempuan priyayi Jawa dalam novel *PP*, *Ct*, dan *GT*.

Penelitian Suroso yang berjudul “*Multiculturalism in Indonesian Novels as A Culture –Uniting Device*” yang dimuat di *Mediterranean Journal of Social. Sciences* Volume 3 No. 22 September 2014 juga memiliki relevansi dengan penelitian ini. Penelitian Suroso bertujuan untuk menggambarkan multikulturalisme dalam delapan novel Indonesia di era pascakemerdekaan. Novel yang diteliti antara lain *Bekisar Merah* (2005) dan *Kubah* (2011) karya Ahmad Tohari, *Burung-Burung Manyar* (1993) karya J.B. Mangunwijaya, *Keluarga Permana* (1978) karya Ramadhan K.H., *Laskar Pelangi* (2006) karya Andrea Hirata, *Para Priyayi* (2003) karya Umar Kayam, *Pengakuan Pariyem* (2008) karya Linus Suryadi A.G., *Canting* (2007) karya Arswendo Atmowiloto, dan *Tarian Bumi* (2003) karya Oka Rusmini.

Novel-novel tersebut dianalisis menggunakan teori-teori sosial berdasarkan pluralistik dalam budaya. Temuan dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa multikulturalisme dalam masyarakat Indonesia diwujudkan dalam penggunaan berbagai bahasa dalam karya sastra seperti dalam novel berbahasa Indonesia dengan suasana warna lokal. Temuan juga berisi pemahaman kelas sosial priyayi dan *wong cilik* dalam novel *Ct* dan *Pengakuan Pariyem*, pengabdian masyarakat pada tokoh Bapak Harfan dan Muslimah yang mengajar di daerah terpencil dalam novel, pemahaman antaragama antara Fx. Sumarta dan Farida dalam novel *Keluarga Permana*, ekspresi kasih sayang tokoh Haji Bakir dalam novel *Kubah*, dan pemahaman pernikahan antarsuku bangsa dalam novel *Saman*. Novel-novel tersebut juga berfungsi sebagai perangkat budaya yang mampu menyatukan.

Persamaan penelitian Suroso dengan penelitian ini terletak pada kajian budaya dan kaitannya dengan pendidikan karakter. Perbedaannya, penelitian Suroso lebih menyoroti multikulturalisme dalam karya sastra, sedangkan penelitian ini berfokus pada hegemoni budaya priyayi Jawa dalam kaitannya dengan pendidikan karakter. Sumbangan penelitian Suroso kepada penelitian ini adalah lebih memberi penguatan pada analisis budaya priyayi Jawa yang terdapat pada novel *PP*, *Ct*, dan novel *GT*.

Berdasarkan hasil-hasil penelitian yang relevan dengan pendidikan karakter tersebut, dapatlah disimpulkan bahwa novel adalah asumsi dan keyakinan dunia pengarang yang berhubungan dengan realitas politik, sosial, ekonomi, etika,

religiusitas, dan budaya masyarakat. Pelanggaran verbal dan penyimpangan etika dilakukan oleh kelompok kelas penguasa dan masyarakat yang memiliki status sosial tinggi dan mencerminkan diskriminasi sistem kelas. Karya sastra mengandung ungkapan bakti kepada Tuhan, raja, dan orang tua, serta sebagai perangkat budaya alat pemersatu. Makna peristiwa yang terkandung di dalam karya sastra dapat dijadikan sebagai sarana pendidikan karakter.

## B. Landasan Teori

### 1. Hakikat Novel

Novel merupakan cara yang baik untuk mewakili, mengeritik fenomena-fenomena sosial yang tidak konsisten dengan nilai-nilai moralitas. Di dalam novel, direpresentasikan kritik dan protes pada kondisi masyarakat yang tidak benar. Kemudian, dengan novel diharapkan kondisi masyarakat bisa diperbaiki. Hal ini sejalan dengan pendapat Hicks (1952:355) sebagai berikut.

*What has happened to the novel of social protest? In the thirties , as everyone recalls, American fiction seethed with moral indignation and social revolt. From John Dos Passos tThe 42nd Parallel in 1930 to John Steinbeck's The Grapes of Wrath in 1939, our literature was on the offensive . An was no lack precedent for this rebellious Upsurge. After all, it was in 1906 that Upton Sinclair published The Jungle , the most influential of his many novels of social protest , and Uncle Tom's Cabin, the best known exemplar of the type, appeard in 1832.*

*Perhaps we should make a distinction social protest and social criticism. The novel of social protest is aimed against a specific evil—the institution of slavery , conditions in the Chicago stockyards , the*

*suffering of the okies. It points to a wrong that can be righted. The novel of social criticism is concerned in a larger way with the social structure. It is broader and deeper , and its influence is harder to measure , it is life is usually longer(Hicks, 1952:355).*

Dalam kutipan tersebut, diungkapkan bahwa novel yang bersikap kritis kepada permasalahan sosial akan menjadi kekuatan besar untuk mengadakan perubahan moral sosial sebagaimana dalam novel *Uncle Tom Cabin*. Novel yang merepresentasikan permasalahan sosial akan tercatat di dalam sejarah perubahan sistem kemasyarakatan dari masyarakat yang mengesahkan perbudakan ke masyarakat yang menghargai hak asasi manusia. Namun, novel yang mengungkapkan realitas sosial sering berdampak negatif bagi nasib pengarangnya, sehingga pengarang perlu menyamarkan karyanya agar tidak memiliki hubungan langsung dengan realitas sosial itu, demi keamanan pengarang.

Untuk menghilangkan hubungannya dengan realitas tokoh dalam novel, tokoh tersebut dikatakan fiktif. Dengan begitu, pengarang dapat terbebas dari tuduhan membongkar rahasia pribadi yang berdampak pencemaran nama baik. Oleh sebab itu, pengarang sering memadukan realitas sosial dengan realitas imajinasi sebagaimana pendapat Junus (1989:88) yang mengatakan bahwa novel atau fiksi merupakan adunan (perpaduan) imajinasi dan realitas autentik.

Pendapat Junus tersebut didukung oleh pendapat Teeuw (1988:230) bahwa pembaca roman (novel) harus mendekati kenyataan. Dunia yang disajikan dalam roman (novel) harus akrab dengan kenyataan.

Pendapat tersebut sejalan dengan Winarni (2009: 164-165) yang mengatakan bahwa dunia nyata dan dunia sastra selalu saling berjalanan. Dalam novel, realitas biasanya ditimbulkan dengan kesan pada pembaca seakan-akan kenyataan diberikan setempat dan secermat mungkin sehingga pembaca seperti mengalami apa yang realistis dalam kehidupannya.

Berkaitan dengan hal tersebut, Abrams (1981:120) mengatakan bahwa Novel adalah fiksi yang mencoba memberikan efek realistis dengan merepresentasikan karakter yang kompleks. Novel memadukan bermacam-macam motif tokoh berdasarkan kelas sosial. Novel juga membedakan pengembangan karakter struktur sosial tinggi, yang berinteraksi dengan berbagai karakter, yang dapat diterima sesuai dengan akal dalam pengalaman hidup sehari-hari.

Bertolak dari hal tersebut, dapat dikatakan bahwa novel menampilkan ciri masyarakat, baik itu permasalahan kelas sosial, budaya maupun nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Wardani (2009:16) mengatakan bahwa novel adalah fiksi yang mengungkapkan cerita tentang kehidupan tokoh dan nilai-nilainya. Novel juga merupakan representasi masyarakat tertentu, kelompok tertentu. (Ratna, 2010:510).

Novel apabila dibaca memiliki fungsi tertentu. Novel sebagai media untuk menyebarluaskan pengetahuan. Karenanya, rangkaian peristiwa yang ada pada novel merupakan deretan sangkutan pengetahuan yang disampaikan oleh pengisah (Damono, 2000: 240).

Menurut Dickens, novel juga memiliki potensi etis dan politik yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengungkapkan gagasan yang berhubungan dengan

reformasi moral dan sosial. Dickens melalui novelnya, menjadi kritikus ketidakadilan sosial ekonomi masyarakat pada zamannya. Gagasan-gagasan dalam novelnya meningkatkan kesadaran para pembaca. (Diniejko, dkk., 2006: 1)

Melalui novel, pembaca sering kali lebih mudah menghayati dan memahami eksistensi manusia dengan segala permasalahannya, karena novel yang baik menciptakan kembali keseluruhan hidup yang dihayati, kehidupan emosi, kehidupan budi, individu maupun sosial, dan dunia yang syarat objek. Novel tersebut diciptakannya seperti yang terjadi dalam kehidupan yang kita hayati sendiri (Teeuw, 1988:237).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dinyatakan bahwa novel adalah fiksi yang mengungkapkan imajinasi pengarang yang ditulis dengan bahasa khas. Novel berisi kristalisasi antara realitas dan rekaan kreatif pengarangnya untuk menyetujui atau menolak fenomena nilai-nilai budaya yang dianut masyarakat. Dalam novel, terungkap realitas sosiobudaya masyarakat yang sesuai dengan ideologi pengarang dan novel berfungsi sebagai media pendidikan.

## 2. Hakikat Teori Hegemoni

Antonio Gramsci memiliki teori paling erat hubungannya dengan konsep hegemoni. Gramsci menggunakan "hegemoni" tidak hanya digunakan sebagai syarat untuk menggulingkan kaum borjuis oleh kaum proletar dan sekutunya (misalnya, kaum tani), tetapi juga struktur kekuasaan borjuis pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 di negara Eropa Barat.



Teori hegemoni Gramsci terdapat dalam *Quaderni del Carcere* atau *Penjara Notebook* (ditulis pada akhir 1920-an dan awal 1930-an saat dipenjara oleh Pemerintahan Fasis). Gramsci memberi arti hegemoni mengacu pada proses kepemimpinan moral dan intelektual yang didominasi oleh kelas bawahan pasca-1870, di negara-negara Eropa Barat.

Menurut Patria dan Andi Arief (2003:122), Gramsci mendefinisikan hegemoni sebagai kepemimpinan moral dan intelektual serta dominasi politik dalam bentuk kontrol yang dilaksanakan oleh kelas yang dominan, dalam arti kelas Marxis dari kelompok kontrol alat-alat produksi; Gramsci menggunakan "kelompok fundamental" sebagai penghalus istilah "kelas". Bagi Gramsci, kelas dominan bagi bangsa Eropa Barat yang termasuk besara dalam borjuis, yang didefinisikan dalam Manifesto Komunis sebagai "kelas Kapitalis modern, pemilik alat-alat produksi sosial dan pengusaha dari upah tenaga kerja," sedangkan yang disebut penting (karena berpotensi revolusi-terkemuka) sebagai kelas bawahan adalah proletariat, "kelas-upah buruh modern yang, tidak memiliki alat produksi sendiri, dan menjual tenaga kerja mereka sebagai kekuatan untuk hidup". Gramsci menggunakan istilah hegemoni tidak dapat dipahami jika terlepas dari konsep-konsep lain yang berkembang, termasuk dari "Negara" dan "Masyarakat Sipil."

Konsep awal Gramsci (Simon, 2004:19-20) tentang hegemoni dinyatakan bahwa suatu kelas dan anggotanya menguasai terhadap kelas-kelas di bawahnya dengan cara kekerasan dan persuasi. Menurut Gramsci, Hegemoni adalah suatu organisasi konsensus. Hegemoni merupakan kepemimpinan moral dan

intelektual. Kekuatan hanyalah instrumen untuk menjaga stabilitas kekuasaan terhadap ideologi, moral, dan kultur penguasa. Untuk menguasai ideologi, seseorang memerlukan golongan intelektual karena golongan intelektual memiliki fungsi mediator. Hal ini sejalan dengan pendapat Holub ( 1992:153-154) sebagai berikut.

*As intellectuals, they understand themselves as autonomous, politically unattached but linked to the great cultures of the western tradition. Notwithstanding their self-assessment, these exceptional intellectuals often ideologically support the big land-owners of the area. Indeed, the social stratum of the land-owners produces its own intellectuals for this very purpose. On a secondary or perhaps another level, consensus is produced and circulated by the intellectuals of the rural petty bourgeoisie: the pharmacist, the lawyer, the priest, the local newspaper editor, the schoolteacher, and so forth who express, with a few exceptions, a set of values which have a specific function: emotionally, ideally and materially to tie the exploited masses of the peasants to the landed property owners. As mediators between the peasant masses and the big landowners , the group of rural petty bourgeois intellectuals is extremely important for the survival of the agrarian bloc. (Holub, 1992:153-154).*

Dengan kutipan tersebut, Holub menyatakan bahwa para intelektual pada umumnya mendukung golongan petani besar apabila dianalogikan sebagai kapitaslis di dalam melaksanakan kepentingan petani besar, walaupun golongan intelektual itu sendiri pada mulanya ada yang berasal dari petani kecil. Mereka diharapkan mampu mengaspirasikan suara petani sebagai kelompok kelas inferior. Fungsi golongan

intelektual di dalam menjalankan hegemoni petani besar adalah sebagai mediator antara kepentingan kelompok dominan dengan kelompok inferior.

Dengan fungsi mediasi dari golongan intelektual, diperoleh persetujuan spontan dari masyarakat sipil yang dilakukan oleh kelompok dominan sehingga kelompok dominan berkat posisinya dalam fungsi produksi, etika, dan moral yang berpengaruh kepada masyarakat sipil petani kecil dapat menjadi kelompok hegemoni. Dengan demikian, fungsi intelektual tersebut sebagai mediasi ideologis kelompok hegemoni.

Hegemoni tersebut dapat dikatakan terjadi pada kedudukan kelompok ideologis satu atau lebih kelompok atau kelas dalam masyarakat sipil yang lebih tinggi dari yang lainnya. Hegemoni juga bisa merujuk kepada kekuatan politik yang dominan di sebuah negara dengan konsep spirit moralitas, adat, religi, prinsip-prinsip politik dan semua relasi sosial yang menyebar melalui masyarakat dan sebuah lembaga. Hegemoni berhubungan dengan penyusunan kekuatan negara kelas diktator ( Patria&andi Arief, 2003:32).

Gramsci juga berpendapat bahwa kelas-kelas *subaltern* tidak dapat bergabung dan bersatu sampai mereka menjadi negara. Oleh karena itu, perlu dipelajari tentang karakter *subaltern* sebagaimana pernyataan Salamina berikut.

*Gramsci writes : It is necessary to study: 1) the objektive formation of the subaltern social groups, by the developments and transformations occurring in the sphere of economic productions... 2) their active of passive affiliation to the dominant political formations, their attempts to influence the programmes of these formations in order to press claims*

*of their own...; 3) the birth of new parties of the dominant groups, intended to conserve the assent of the subaltern groups and to maintain control over them; 4) the formations which the subaltern groups themselves produce; 5) those new formations which assert the authonomy of the subaltern groups, but within the old framework; 6) those formations whic assert the integral autonomy... (Salamini, 1981:69).*

Maksud pernyataan tersebut adalah di dalam pembinaan kelompok subaltern perlu dikaji bagaimana kelompok *subaltern* itu dari formasi asal-usulnya, mentalitas ideologi yang mereka kekalkan, dan perkembangan kekuatan ekonomi yang berhubungan dengan alat produksi yang dimiliki. Kelompok *subaltern* juga perlu dikaji keaktifan mereka di dalam formasi politik yang diperjuangkan oleh kelompok dominan. Peran politik kelompok dominan di dalam mengontrol dan menekan mereka juga dikaji agar memiliki kebaruan sesuai dengan misi kelompok dominan. Kelompok *subaltern* juga harus diberi otonomi sebagai subordinasi dari kelompok dominan dalam mempengaruhi kualitas organik masyarakat.

Untuk menetapkan kualitas organik berbagai strata dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas perlu dibenahi 2 tingkat struktur masyarakat yang utama. Yang satu disebut masyarakat madani merupakan perwakilan organisme umum (swasta) sedang yang kedua disebut masyarakat politik atau negara. Dua tingkat struktur masyarakat ini sesuai dengan satu sisi hegemoni yang merupakan kelompok dominan menguasai masyarakat, dengan fungsi dominasi langsung atau perintah yang diberikan ke seluruh negara dan perintah yuridis. Fungsi-fungsi yang dipertanyakan

lebih tepatnya bersifat organisasional dan konektif. Kelompok intelektual adalah deputi-deputi kelompok dominan yang mempunyai fungsi-fungsi *subaltern* dari hegemoni sosial dan pemerintahan politis. Ini terdiri atas:

1) Persetujuan spontan yang diberikan oleh massa besar dari populasi untuk arah umum yang dibebankan pada kehidupan sosial oleh kelompok fundamental dominan. Persetujuan ini secara historis disebabkan oleh prestise (dan kepercayaan) yang dinikmati kelompok dominan karena fungsi dan posisi mereka dalam dunia produksi.

2) Aparat negara mempunyai kekuasaan yang secara hukum menguatkan disiplin pada kelompok-kelompok yang tidak setuju baik secara aktif maupun pasif. Aparat ini meskipun demikian terdiri dari keseluruhan masyarakat dalam antisipasi terhadap momen-momen krisis perintah dan arah persetujuan spontan yang gagal.

Lagi pula, aktivitas intelektual harus dibedakan dari karakteristik intrinsik. Perbedaan sesuai dengan tingkat yang dalam momen oposisi ekstrim mewakili perbedaan kualitas nyata. Pada tingkat paling tinggi akan menjadi pencipta berbagai ilmu, pengetahuan, filsafat, seni, dan sebagainya. Pada tingkat paling rendah mereka akan menjadi administrator paling sederhana dan pembongkar harta benda intelektual tradisional yang terakumulasi. (Hoare, 2000: 143).

Menurut Gramsci (Holub, 1992: 160-161), ada dua jenis intelektual yaitu intelektual tradisional dan intelektual organik. Intelektual tradisional akan mendukung politik feodalisme dan kelompok ekonomi kuat sedangkan intelektual organik yang berasal dari kelompok proletar, yang sebelumnya memperjuangkan



kepentingan kelompok proletar, bergeser mendukung kelompok sosial ekonomi politik yang kuat sebagaimana pada kutipan berikut.

*The distinction between 'traditional' and 'organic' intellectual is, as is the case with most Gramscian distinctions, a complex one that expresses more than simply one function or relation. In his history of the Italian intellectual, Gramsci found that every social group, coming in to existence on the original terrain of an essential function in the world of economic production, creates together with itself, organically, one or more strata of intellectuals which give it homogeneity and an awareness of its own function not only in the economic but also in the social and political fields'. In this sense, traditional intellectuals are also organic intellectuals (Holub, 1992: 160-161).*

Bagi Gramsci, objek-objek kebudayaan dengan kegiatan praxis seperti pendidikan, jurnalistik, gereja, universitas, organisasi kemasyarakatan dan apa saja yang komplementer bagi sistem negara merupakan hal yang menarik untuk diteliti. Studi mengenai kebudayaan juga meliputi berbagai aktivitas kultural lainnya, seperti seni dan kesusasteraan (Faruk, 1994:67).

Studi sastra juga dilakukan oleh Ariel yang menemukan bahwa sastra Indonesia dihegemoni oleh bentuk kesusasteraan mapan. Posisi karya sastra ditentukan oleh penguasa politik, penerbit terkenal, karya yang dibahas oleh para pakar akademik, karya yang digunakan untuk lomba apresiasi sastra dan buku-buku yang dipamerkan di toko-toko buku besar. Selain itu, karya sastra dinyatakan besar apabila tercantum pada buku pelajaran di sekolah dan sejarah sastra (Faruk, 1994:



98) Di bidang seni sastra, teori hegemoni Gramsci sudah digunakan oleh Ariel Haryanto, Raymond Williams, Harjito, dan Faruk.

Williams, dalam menerapkan teori hegemoni Gramsci, membuat suatu garis-garis besar perbedakan antara ciri-ciri kebudayaan yang terlibat dalam kekuasaan menjadi tiga kategori: kebudayaan hegemonik atau dominan, kebudayaan bangkit atau *emergent*, dan kebudayaan endapan atau residual (Faruk, 1994:79).

Pernyataan Williams yang berhubungan dengan konsep kebudayaan dominan, residual dan *emergent* sebagaimana pada kutipan berikut.

*A residual cultural element is usually at some distance from the effective dominant culture, but some part of it, some version of it -and specially if the residue is from some major area of the past-will in most cases have had to be incorporated if the effective dominant culture is to make sense in these areas. Moreover, at certain points the dominant culture cannot allow too much residual experience and practice outside itself. at least without risk. It is in the incorporation of the actively residual by reinterpretation, dilution, projection, discriminating inclusion and exclusion-that the 'ark of the selective tradition' is especially evident.*

....

*By 'emergent' I mean, first, that new meanings and values, new practices, new relationships and kinds of relationship are continually being created, But it is exceptionally difficult to distinguish between those which are really elements of some new phase of the dominant culture (and in this sense 'species-specific') and those which are substantially alternative or oppositional to it: emergent in the strict sense, rather than merely novel. Since we are always considering relations within a cultural process, definitions of the emergent, as of the residual, can be made only*

*in relation to a full sense of the dominant. Yet the social location of the residual is always easier to understand. since a large part of it (though not all) relates to earlier social formations and phases of the cultural process, in which certain real meanings and values were generated. In the subsequent default of a particular phase of a dominant. Culture there is then a reaching-back to those meanings and values which were created. in actual societies and actual situations in the past, and which still seem to have significance because they represent areas of human experience, aspiration, and achievement with the dominant culture neglects, undervalues, opposes, represses, or even cannot recognize.*  
(Williams, 1977: 123-124)

Dalam kutipan tersebut dinyatakan bahwa kelompok residual merupakan kelompok yang masih mengembangkan gagasan masa lampau oleh leluhurnya dijadikan sebuah tradisi yang biasanya diikuti oleh kelompok bangsawan atau aristokrat. Karena ada penafsiran agama atau paham baru yang berbeda-beda, maka sebagian dari kelompok residual bangkit untuk berkuasa. Kelompok tersebut disebut oleh Williams sebagai kelompok *emergent*. Kelompok *emergent* dikeluarkan oleh kelompok dominan yang didukung oleh kelompok residual di dalam melaksanakan hegemoni.

#### a. Macam-macam Hegemoni

Hegemoni merupakan kegiatan dominasi dan kontrol yang dilakukan oleh kelompok dominan. Fungsi hegemoni untuk mempertahankan kekuasaannya dengan cara bermacam-macam sebagai berikut.

### 1) Hegemoni Politik

Hegemoni politik adalah hegemoni yang dilakukan oleh penguasa di bidang politik. Bentuk peraturan bersifat menekan masyarakat sipil dan menginternalkan peraturan tersebut agar dengan kesadarannya diterima oleh masyarakat sipil. Peraturan tersebut bertujuan menekan pergerakan yang dipandang membahayakan posisi penguasa. Hal itu sesuai dengan pendapat Gramsci ( Patria & Andi Arief , 2003: 146) bahwa negara memiliki sejumlah aktivitas praktik dan teori yang kompleks sehingga kelas yang berkuasa tidak hanya membenarkan dan mempertahankan dominasi, tetapi juga mengaturnya untuk memenangkan pemaksaan aktif terhadap kekuasaan kelompok atas kelompok yang dikuasai.

### 2) Hegemoni Bahasa

Penguasa pemerintahan atau negara memiliki tugas dan wewenang untuk mengembangkan bahasa yang menjadi alat untuk menekan dalam komunikasi. Bahasa digunakan sebagai alat penekan memiliki pengertian bahwa penguasa membuat peraturan kepada masyarakat. Setiap anggota masyarakat yang bisa menduduki jabatan tertentu harus mampu berbahasa sesuai dengan bahasa yang dikehendaki penguasa. Gramsci terus memanfaatkan pemahaman kita tentang hubungan antara bahasa dan politik. Bahasa digunakan sebagai sarana revolusi pasif. Semua kelompok yang dikuasai oleh kelompok dominan diwajibkan menggunakan bahasa terpadu, yaitu bahasa yang efektif digunakan untuk berkomunikasi antara penguasa dan masyarakat sipil, sehingga bahasa tersebut efektif digunakan sebagai alat penekan dan alat konsensus. Hal itu sejalan dalam kutipan berikut.

*Gramsci proposed a constitutively different form of hegemony, a counter-hegemony, that would be democratically rather than bureaucratically centralized. Gramsci's paradigmatic use of la questione della lingua and his promotions of unified national language illustrates how his linguistics illuminates his political theory. He was critical of the strategies for creating a unified national language proposed by Manzoni and Esperanto, arguing that however progressive these projects were meant to be, they would result in the problems of 'passive revolution' and thwart any progress toward a democratic, national, popular collective will. This suggests the most pressing question that needs to be asked of 'global English', the 'English only' movement in the United States, and all movements for language rights and regulations. (Ives, 2004:177).*

Dalam kutipan tersebut, Gramsci menyatakan bahwa bahasa nasional yang digunakan secara terpadu bisa digunakan sebagai alat revolusi pasif. Dengan bahasa nasional, hegemoni penguasa akan dapat menggagalkan setiap perlawanan yang diinginkan oleh masyarakat. Dengan mengukuhkan bahasa tertentu di kalangan masyarakat sipil, berarti telah terjadi hegemoni bahasa.

### 3) Hegemoni Pendidikan

Penguasa di dalam mempertahankan dan mengembangkan kekuasaannya juga melalui pendidikan. Berkaitan dengan itu, hegemoni sangat efektif dilakukan di bidang pendidikan dengan cara membuat kurikulum yang sesuai dengan kehendak ideologi penguasa. Melalui pendidikan Gramsci (Hoare, 2000: 179-180) berpendapat bahwa

Di sekolah, keterikatan antara instruksi dan pendidikan hanya dapat direalisasikan oleh kerja nyata guru. Untuk itu ia harus sadar akan perbedaan antara jenis budaya dan masyarakat yang dia wakili dan jenis

budaya dan jenis masyarakat yang direperesentasikan oleh siswa-siswanya, dan sadar akan kewajibannya untuk meningkatkan dan mengatur pembentukan anak sesuai dengan jenis budaya pertama dan bertentangan dengan yang kedua.

Maksud kutipan tersebut adalah penguasa merumuskan kurikulum yang berisi peraturan untuk mengondisikan sikap peserta didik terbentuk sesuai dengan kehendak penguasa dalam rangka melanggengkan kekuasaannya. Dalam hal tersebut, guru secara sadar harus merasa memiliki kewajiban untuk melaksanakan kurikulum tersebut. Peserta didik yang lulus diharapkan menjadi pekerja yang taat kepada peraturan yang dibuat penguasa.

#### 4) Hegemoni Media

Penguasa, di dalam menyampaikan program-programnya, memerlukan saluran dengan sasaran masyarakat sipil. Saluran informasi tersebut selain disampaikan melalui penguasa di bawahnya, juga disampaikan melalui media massa, baik yang berupa media cetak, audio, maupun media audio-visual. Media tersebut berfungsi sebagai alat penekan dan konsensus massa. Sebagai alat penekan, penguasa membuat peraturan dan kontrol ketat yang disampaikan kepada aparatnya agar tidak membaca media di luar media penguasa. Sebagai alat konsensus imperialis, media menentukan bahwa hanya orang-orang yang patuh pada peraturan pemerintah yang kedudukannya akan bertahan. Media dibuat agar masyarakat mendukung penguasa sebagaimana pernyataan Barker (2009: 299) berikut.

Schiller (1969: 1985) mengulas bahwa media cocok dengan sistem kapitalis dunia dengan menyediakan dukungan ideologis bagi



kapitalisme, dan korporasi transnasional khususnya. Media dianggap sebagai kendaraan bagi pemasaran korporat, memanipulasi penonton dan menjadikan mereka sebagai pemasang iklan. Ini beriringan dengan pengakuan atas efek ideologis secara umum di mana pesan-pesan media menciptakan dan memaksa keterikatan penonton kepada status quo. (Barker: 2009: 299).

#### 5) Hegemoni Ekonomi

Ciri sebuah hegemoni ekonomi adalah kelompok dominan yang memiliki kekuasaan tidak terbatas terhadap masyarakat sipil sehingga menguasai alat produksi, distribusi, dan bisa menentukan pasar sehingga kelompok korporasi yang lain tidak bisa melawan. Hal ini sejalan dengan yang dikatakan oleh Simon (2004: 117) bahwa

Sebuah kelas yang sedang bergerak maju ke arah hegemoni harus berusaha mencapai kepemimpinan dalam bidang produksi :”Meskipun hegemoni bersifat etis-politis, ia juga harus bersifat ekonomis, yang dibangun di atas fungsi yang menentukan dari kelompok yang sedang memimpin dalam sektor produksi yang vital.”

Terjadinya hegemoni ekonomi disebabkan oleh adanya kesatuan ideologis antara elite ekonomi, sosial, dan ekonomi yang secara potensial diciptakan oleh negara baru yang dicita-citakan oleh kelompok hegemonis (Patria & Andi Arief, 2003: 129). Dengan demikian, kelompok dominan yang menjadi kelompok hegemonis tidak mau menyesuaikan kepentingan-kepentingannya dengan pihak lain di dalam korporasi. Mereka berusaha mempertahankan peraturan yang mereka buat dengan para elit politik, sosial, dan budaya yang telah mereka kuasai. Hegemoni di bidang ekonomi merupakan penguasaan menyeluruh kegiatan ekonomi yang diatur



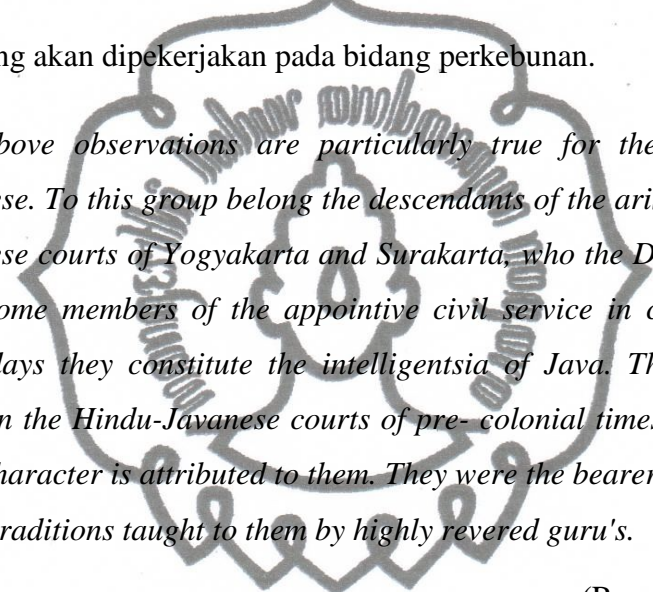
oleh negara dengan segenap peraturan yang memaksa. Pihak penguasa berusaha mengadakan konsensus dengan kekuatan-kekuatan ekonomi agar menjadi subordinat ekonomi bagi kelompok dominan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapatlah disimpulkan bahwa Hegemoni adalah kekuasaan totaliter yang dilakukan dengan cara konsensus dan kontrol kepada masyarakat. Dengan konsensus, pihak masyarakat harus menginternalisasikan nilai-nilai dan norma penguasa. Masyarakat harus menyetujui subordinasi penguasa. Hegemoni dilakukan oleh kelompok dominan (penguasa) melalui kelompok *subaltern* yaitu para intelektual. Kelompok *subaltern* melakukan hegemoni kepada kelas bawah (masyarakat sipil) agar menerima ideologi kelompok dominan menjadi ideologi hegemonik. Agar konsensus menghasilkan hegemoni yang efektif, kelompok dominan selalu mengadakan kontrol ketat. Pihak yang melanggar peraturan diberi sanksi, pihak yang mendukung diberi fasilitas. Alat kontrol kelompok dominan untuk melaksanakan hegemoni adalah politik, bahasa, pendidikan, media massa, dan ekonomi. Tujuan hegemoni adalah pelanggaran kekuasaan.

### 3. Budaya Priyayi Jawa

Istilah *priyayi* oleh Geertz (1983:305) dibahas sebagai salah satu varian golongan masyarakat setelah abangan, dan santri. Menurut Geertz (1983: 308), pada mulanya priyayi itu mempunyai unsur kebangsawanan. Antara lain, orang yang bisa melacak asal-usul keturunannya sampai pada raja-raja besar Jawa zaman sebelum pemerintahan Hindia Belanda. Hal ini juga sejalan dengan pendapat Rogge (2008:3) bahwa kelompok priyayi Jawa terdiri dari keturunan bangsawan, yang berasal dari

Yogyakarta dan Surakarta yang menjadi birokrat sipil pada kantor-kantor Pemerintahan Hindia Belanda pada masa kolonial. Arti priyayi bergeser sejak Belanda memerintah Jawa lebih dari 300 tahun itu mempekerjakan kelompok priyayi sebagai instrumen administrasi kekuasaannya. Pengertian priyayi menjadi meluas termasuk orang kebanyakan yang ditarik ke dalam birokrasi akibat kurangnya priyayi bangsawan yang akan dipekerjakan pada bidang perkebunan.



*The above observations are particularly true for the priyayi type Javanese. To this group belong the descendants of the aristocracy of the Javanese courts of Yogyakarta and Surakarta, who the Dutch won over to become members of the appointive civil service in colonial times. Nowadays they constitute the intelligentsia of Java. They have their roots in the Hindu-Javanese courts of pre-colonial times. A noble and pure character is attributed to them. They were the bearers of the mystic court-traditions taught to them by highly revered guru's.*

(Rogge, 2008:3)

Dalam kutipan tersebut, diungkapkan bahwa yang termasuk priyayi adalah para bangsawan dan para pegawai kolonial. Priyayi merupakan kaum intelektual Jawa yang memiliki akar kebudayaan Hindu-Jawa sehingga priyayi merupakan pembawa tradisi mistik dan menghormati guru mistiknya.

Koentjaraningrat (1994: 234) mengelompokkan priyayi menjadi dua macam, yaitu priyayi *pangreh praja* dan priyayi bukan *pangreh praja*. Yang termasuk priyayi *pangreh praja* adalah bupati, wedana, asisten wedana, beserta eselon-eselon dalam struktur kekuasaannya masing-masing. Selanjutnya, priyayi di luar *pangreh praja*

adalah seluruh pegawai pemerintah di luar ketataprajaan, seperti jaksa, dokter, guru, dan pejabat-pejabat pelayanan / bisnis yang dijalankan oleh pemerintah.

Menurut Soekiman (2011: 11), timbulnya kelompok priyayi ini diawali sejak abad kedelapan belas. Perusahaan-perusahaan perkebunan Belanda makin tumbuh sehingga Belanda memerlukan pegawai-pegawai yang terampil dan dididik di berbagai bidang di luar pemerintahan yang sering digolongkan menjadi priyayi di luar *pangreh praja*. Pendapat tersebut memiliki kesamaan dengan pendapat Suseno (2001: 13) bahwa kaum priyayi tidak bekerja dengan tangan. Yang masuk ke dalam golongan ini adalah kaum pegawai dari berbagai tingkat dan cabang, mulai dari guru SD, pegawai kantor pos dan kereta api di kota-kota kecil sampai pegawai menengah dan tinggi di kota besar.

Selanjutnya, Kata *budaya* menurut Koentjaraningrat (1985: 80) berasal dari *buddhaya* (Sanskerta) sebagai bentuk jamak dari *budhi* yang berarti akal. Kemudian arti tersebut oleh Hasan (2011: 19) dikembangkan menjadi seluruh aspek kehidupan manusia dalam masyarakat yang diperoleh dengan cara belajar termasuk pikiran dan tingkah laku. Sardar dan Loon(1997: 4) mengatakan bahwa kebudayaan adalah keseluruhan aktivitas manusia termasuk pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan lain. Berhubungan dengan hal tersebut, Koentjaraningrat (1985: 80) membedakan tiga wujud kebudayaan, yaitu (1) kebudayaan sebagai kompleks ide, gagasan, nilai, norma, dan peraturan, (2)

kebudayaan sebagai kompleks aktivitas kelakuan berpola manusia dalam masyarakat, dan (3) kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia.

Berkait dengan kebiasaan, Kartodirdjo, Sudewa dan Hadmosuprobo (1987: 38) menyatakan bahwa kebiasaan kehidupan priyayi bangsawan dan priyayi profesional hampir memiliki kesamaan. Pada umumnya ukuran rumah priyayi bangsawan bermodel tradisional dengan pekarangan yang luas dilengkapi dengan berbagai perhiasan yang hampir sama dengan model keraton sebagai pusat kebudayaan. Rumah priyayi profesional bergaya barat, baik bentuk maupun strukturnya. Pada umumnya, para priyayi Jawa tidak menonjol bergerak di bidang perekonomian meskipun bergaya hidup mewah. Budaya priyayi yang demikian mengacu pada kehidupan para bangsawan yang menganggap tabu apabila berdagang. Hal ini sejalan dengan pendapat Ong (2002: 12-13) yang mengatakan bahwa pada umumnya priyayi tidak mampu mengelola keuangan sendiri dan tidak memiliki jiwa wirausaha. Keluarga priyayi yang berdagang bahkan diejek sebagai *ndoro bakulan*.

Kelemahan priyayi di bidang ekonomi tersebut menyebabkan kemunduran peran golongan priyayi di mata masyarakat karena krisis ekonomi dan Perang Dunia II. Golongan priyayi tidak bisa menopang segala kebiasaan hidup feodal dan bermewah-mewah. Mereka hidup sebagai orang biasa seperti rakyat biasa yang serba kekurangan (Kartodirdjo, Sudewa dan Hadmosuprobo, 1987: 24).

Golongan priyayi yang berasal dari golongan terpelajar dari petani hanya dapat meniru gaya hidup priyayi, tetapi tidak mengetahui makna kepriyayian.

Sesudah tahun 1945 kejayaan kepriyayian dapat dikatakan berakhir (Kartodirdjo, Sudewa dan Hadmosuprobo 1987: 25). Gaya hidup yang menjadi kebiasaan itu antara lain upacara resepsi bermewah-mewah untuk menjaga kewibawaan atau men-*jaga praja*(menjaga harga diri). Priyayi senang memiliki gelar-gelar kebangsawanan.

Dalam menyesuaikan perubahan masyarakat, para priyayi menyekolahkan anaknya ke sekolah umum, bukan ke pondok pesantren. Priyayi sebagai *elite* birokrat bersifat kooperatif dengan Belanda di satu bidang, dan pada pihak lain belum sepenuhnya lepas dari tradisionalisme dan feodalisme. Pada umumnya, priyayi terpelajar senang memberi nama anak-anaknya dengan bahasa Sanskerta. Untuk menjadi priyayi terpelajar, terlebih dahulu seseorang *magang* atau *ngenger* ke tempat priyayi yang mau menanggung segala kehidupannya (Kartodirdjo, Sudewa dan Hadmosuprobo 1987: 103).

Di dalam mendidik moral anak, priyayi mengambil teladan dari cerita wayang. Bila akan mengawinkan anak perempuan, pembicaraan diselesaikan antarkeluarga calon besan, dan anak perempuan tinggal menerima perintah orang tua. Pesta perkawinan pihak perempuan diadakan secara mewah dengan tidak meninggalkan *jaga praja*. Biasanya, priyayi menganggap hiburan pertunjukan wayang *kulit*, wayang *wong*, *kethoprak*, atau orkes keroncong. Selain itu, priyayi juga memiliki *kelangenan* bermain kartu untuk mengisi waktu pada acara kelahiran anak (Kartodirdjo, Sudewa dan Hadmosuprobo 1987: 108-109).

Pendapat Kartodirdjo tersebut membahas kebiasaan-kebiasaan dan kesenangan priyayi. Kebiasaan-kebiasaan priyayi mengacu dari akumulasi dari berbagai ajaran sebagaimana pendapat Rogge (2008: 3) berikut.

*Priyayi conserved and cultivated the art of dance, drama, music and poetry. Sunan (=king) Kalidjogovan(also called Kalidjaga) is credited by some to have given the ancient Wayang play its present form. Before it was part of the Javanese ancestor-worship. The shadow figures represent the spirits of the dead. Subsequently the Hindu epics Mahabharata and Ramayana were introduced and integrated in Wayang performances.* (Rogge, 2008: 3)

Dalam kutipan tersebut, Rogge (2008: 3) menyatakan bahwa segala perilaku priyayi yang berhubungan dengan moralitas bersumber dari ajaran Sunan Kalijaga yang berhubungan dengan mistik Jawa. Moralitas ajaran priyayi mengacu pada cerita-cerita wayang Mahabarata dan Ramayana sebagai akumulasi dari ajaran Hindu-Budha yang bersinkretis dengan ajaran Islam.

Orang Jawa terutama priyayi tentu memiliki nilai-nilai ideal yang menjadi pandangan hidupnya sehingga nilai-nilai yang ideal tersebut membentuk sikap hidup yang positif. Geertz (1983: 311) memberi makna pandangan dunia priyayi mempertentangkan dengan petani. Priyayi memiliki makna *alus* atau halus dan petani memiliki makna kasar. *Alus* berarti murni, berbudi halus, halus tingkah lakunya, sopan, indah sekali, lembut, beradab, ramah. Oleh sebab itu, nilai-nilai yang berhubungan dengan priyayi dikaitkan dengan kehalusan, baik dalam pekerjaan,



etika, etiket, dan estetika. Makin halus perilaku priyayi makin disegani karena kehalusan memiliki nilai peradaban.

Susena (2001:12-13) mengatakan bahwa kaum priyayi adalah pembawa kebudayaan kota Jawa tradisional yang terpandang, terdidik dan dituntut mencapai nilai-nilai kelakuan ideal. Kelakuan priyayi sering dijadikan standar nilai rukun dan hormat di sekitar Keraton Yogyakarta dan Surakarta (Suseno 2001: 66). Rukun berguna untuk menjaga keselarasan. Hormat diartikan sebagai menghormati diri sendiri dan orang lain. Untuk menjaga kehormatan, seorang priyayi menjaga norma kepantasan. Apabila priyayi berbuat kepantasan, priyayi tersebut akan memiliki kewibawaan.

Serupa dengan hal tersebut, De Jong (1976: 73-76) memberikan ciri-ciri sikap hidup priyayi pada nilai hormat, pengajaran atau pendidikan, dan pekerjaan. Dengan nilai hormat, para priyayi menghormati orang lain memandang dari kedudukannya, kekayaannya, dan kepandaianya. Dengan pengajaran atau pendidikan, kaum priyayi memandang bahwa perguruan dipandang sebagai suatu jalan pintas untuk menduduki sebuah pangkat terhormat. Kaum priyayi menempuh pendidikan bertujuan bukan karena haus ilmu pengetahuan, tetapi karena setelah lulus ingin menjadi pegawai dan memiliki kekuasaan yang tinggi. Dalam kaitan ini, De Jong (1976:74) berpendapat bukan hanya hasrat mahasiswa yang ingin menduduki pangkat tertinggi, tetapi sistem dan kurikulumnya sendiri yang berhubungan erat dengan cita-cita kenaikan pangkat. Dalam hal pekerjaan, kaum priyayi lebih mementingkan kedudukan daripada prestasi kerja. Menurut De Jong (1976: 75) seorang priyayi

memandang rendah pekerjaan kasar dan bertani, tetapi ia bercita-cita menjadi pegawai negeri. Seorang priyayi tidak menghargai bakat kreatif seseorang, tetapi lebih menghargai si pekerja.

Berdasarkan berbagai pendapat tersebut, dapatlah dinyatakan bahwa priyayi adalah sekelompok masyarakat Jawa yang memiliki ciri kehalusan berperilaku, terpendang, bekerja di sektor formal, dan kurang menonjol pada dunia perdagangan. Orientasi spiritual priyayi adalah mistik *kejawen*. Moral yang diajarkan bersumber dari cerita wayang. Secara umum, priyayi dapat digolongkan menjadi 3 sebagai berikut. 1) kelompok masyarakat bangsawan, kelompok ini mendapatkan istilah priyayi karena keturunan. 2) priyayi *pangreh praja*, yaitu orang baik bangsawan maupun bukan tetapi memiliki kedudukan birokrasi di pemerintahan, dan memegang akses politik. 3) priyayi profesional atau intelektual yaitu kelompok masyarakat yang memiliki gaji tetap dan bekerja di luar birokrasi pemerintahan, seperti hakim, jaksa, guru, dosen, dokter, pegawai bank, pegadaian, dan pegawai perusahaan milik negara.

Budaya priyayi adalah kebiasaan priyayi yang berwujud setia kepada atasan, hormat dan rukun. Setia kepada atasan atau pengabdian menyebabkan kepatuhan priyayi sangat tinggi. Hormat priyayi diwujudkan priyayi selalu memelihara jaga gengsi, *jaga praja*, dan berusaha *sembada* (konsisten). Untuk menjaga kehormatan, priyayi senang menyelenggarakan pesta secara mewah dan meniru gaya hidup tradisi keraton. Selanjutnya, rukun diwujudkan priyayi dalam menjaga ketenteraman keluarga dan lingkungan, dengan *commit to user* cara mengadakan pertemuan keluarga dan

menyelesaikan permasalahan dengan bermusyawarah, baik dalam kehidupan berkeluarga maupun dalam bermasyarakat.

#### 4. Ideologi Priyayi Jawa

Menurut Barker (2009: 68), Ideologi dapat dilihat sebagai (1) pandangan dunia kelompok dominan yang menjustifikasi dan memelihara kekuasaan yang setara dengan kebenaran; (2) pandangan dunia kelompok sosial yang menjustifikasi tindakan mereka yang setara dengan kebenaran; (3) pandangan dunia-kelompok dominan yang menjustifikasi dan memelihara kekuasaan mereka, tetapi tidak dapat disetarakan dengan kebenaran namun ia dapat dideskripsikan ulang sehingga tidak wajib diterima; (4) pandangan dunia kelompok sosial yang menjustifikasi tindakan mereka tetapi tidak dapat disetarakan dengan kebenaran.

Bagi Barker, ideologi tidak dapat disetarakan dengan kebenaran meskipun ideologi berasal dari pandangan dunia penguasa dan kelompok sosial. Namun begitu, ideologi dapat dijustifikasi oleh masing-masing kelompok, terutama kelompok penguasa. Oleh sebab itu, ideologi mengacu kepada makna yang digunakan untuk menjustifikasi kekuasaan kelompok berkuasa yang mencakup banyak kelas atau kelompok sosial.

Pendapat Barker tersebut sejalan dengan pendapat Williams bahwa

*The concept of 'ideology' did not originate in Marxism and is still in no way confined to it. Yet it is evidently an important concept in almost all Marxist thinking about culture. and especially about literature and ideas, The difficulty then is that we have to distinguish. three common versions*

*commit to user*

*of the concept, \which are all common in Marxist writing. These area, broadly:*

- (i) a system of beliefs characteristic of a particular class or group;*
- (il) a system of illusory beliefs-false ideas or false consciousness-which can be contrasted with true or scientific knowledge;*
- (iii) the general process of the production of meani.ngs and ideas.*

( Williams, 1977: 55)

Dalam kutipan tersebut, dinyatakan bahwa ideologi merupakan sistem keyakinan yang dimiliki secara khas oleh kelompok sosial atau penguasa. Ideologi juga merupakan sistem keyakinan yang salah bila dipandang dari kebenaran ilmiah, tetapi dapat diterima oleh kelompok sosial tertentu. Ideologi juga merupakan proses kebenaran makna yang merupakan kristalisasi hasil berbagai gagasan dari kelompok penguasa atau kelompok sosial.

Dari aspek kesejarahan,kebudayaan Jawa terbentuk dari akulturasi Hindu, Budha, Islam dan Kristen. Menurut Harsono (2005:164) agama-agama tersebut mempengaruhi seluruh segi kehidupan masyarakat baik sosial politik, ekonomi, filsafat, maupun kebudayaan. Sistem dewa raja, ketentuan nasib, kultus individu berkembang dengan subur secara feodalistik yang berpengaruh kepada raja, abdi dalem, dan kawula.

Seorang priyayi sebagai bawahan diharapkan setia kepada raja atau atasan yang telah memberikan *asah* (menjadikan cerdas), *asih* (menyayangi), *asuh* (mendidik) kepada bawahan. Bawahan tidak boleh membangkang kepada atasan. Untuk mewujudkan cinta kasih bawahan kepada atasan dan melestarikan sebagai

mitra kerja, bawahan harus *asok glondhong miwah pangarem-arem* (upeti yang harus diserahkan kepada raja/atasan), tidak terpaksa. Bila hal itu terwujud prinsip keseimbangan, keselarasan antara atasan dan bawahan akan terwujud (Endraswara, 2003:151).

Priyayi menurut Sri Mangkunegara IV harus memiliki sifat *guna* (pandai dan terampil), *kaya* (serba kecukupan), dan *purun* (pemberani), *ingkanng den antepi* (yang selalu dipegang teguh) dan *nuhoni trah utama* (melaksanakan keutamaan seorang ksatria) sebagaimana Patih Suwanda (Jatmiko, 2005:219). *Guna* berarti pandai dan terampil, *kaya* berarti serba kecukupan sebagaimana Patih Suwanda ketika mendapatkan harta rampasan perang, harta tersebut diserahkan kepada negara, tidak untuk dirinya. *Purun* berarti pemberani penuh semangat dalam melaksanakan tugas tanpa disertai pamrih. Selain itu, priyayi juga perlu memegang Tri Dharma (Bratawijaya, 1997:50) yaitu (1) *melu andarbeni* (ikut memiliki) lembaga atau negara; (2) *melu angrungkebi* (ikut bertanggung jawab) membela nama baik lembaga atau negara; dan (3) *mulad sarira hangrasa wani* (harus berani mawas diri) seberapa jauh pengabdianya kepada lembaga atau negara. Priyayi yang bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut berarti sudah melaksanakan *nuhoni trah utama*.

Dalam *Serat Wirawiyata* yang diajarkan oleh KGPA Mangkunegara IV (Endraswara, 2003: 143) kesetiaan utama seorang bawahan apabila bawahan tersebut bertindak : (1) mantap (2) *taberi* (hidup hemat dan berhati-hati), (3) *temen* (harus menjalankan tugas dan kewajiban secara sungguh-sungguh).

Sultan Hamengkubuwono V, di dalam *Serat Wuruk Respati* (Muslich, dkk, 2006: 59), juga mengajarkan cara seseorang menghadapi pemimpin. Ajaran tersebut berisi cara berbicara, jika atasan marah jangan beraut ceria, cara memandang, cara mempertimbangkan tawaran, cara menempati posisi duduk Seorang bawahan harus cepat-cepat menjawab bila ditanya oleh atasan. Selain itu, seorang bawahan juga jangan merasa berjasa, hendaklah pandai bertata krama.

Dalam syair gambuh *Serat Wulang Reh* (Bratawijaya, 1997:92), juga terkandung maksud agar seseorang menjadi abdi yang baik, yaitu melaksanakan tugas yang diberikan dari pimpinan dengan sebaik-baiknya dengan berpedoman pada (1) *ing ngarsa ambengkas karya* (bila seseorang diberi kepercayaan oleh pimpinan, orang tersebut harus melaksanakan tugas tuntas penuh tanggung jawab); (2) *ing madya tansah ambudidaya* (selalu berupaya bagaimana seseorang dapat mengatasi masalah dengan baik); (3) *ing wuri tansah sumadya* (siapa melaksanakan tugas sewaktu-waktu mendapat perintah tanpa alasan).

Kesetiaan priyayi kepada atasan menimbulkan segala perilaku, baik norma atau etika maupun nilai luhur budaya atasan, bagi priyayi merupakan segala-galanya sehingga atasan merupakan sumber kebenaran. Perintah atasan merupakan amanat yang harus dilaksanakan walaupun tidak sesuai dengan hati nuraninya.

Dari paparan tersebut dapatlah disimpulkan bahwa ideologi priyayi Jawa adalah feodalisme dalam arti seorang priyayi wajib taat kepada atasan atau tidak membangkang yang diwujudkan dengan pemberian upeti secara ikhlas.



## 5. Hegemoni Budaya Priyayi Jawa

Hegemoni priyayi kepada masyarakat sipil atau *wong cilik* dilakukan dengan kontrol melalui ideologi priyayi agar *wong cilik* patuh kepada kehendak priyayi. Kepatuhan itu didasarkan kepada keikhlasan. Kepatuhan *wong cilik* kepada priyayi tidak ditujukan untuk mencari kenaikan pangkat, tetapi merupakan pemenuhan suatu kewajiban (Harsono, 2005: 207).

Kewajiban kepatuhan *wong cilik* kepada bangsawan juga diungkapkan oleh De Jong (1976: 89) bahwa cita dan pandangan hidup bangsawan di waktu yang lalu meresap menjadi pedoman seluruh rakyat. Ide-ide dan nilai luhur feodal diterima secara mutlak karena tidak adanya perbandingan dandianggap sudah semestinya begitu dan tidak bisa lain.

Kepatuhan *wong cilik* kepada bangsawan karena sudah meresap di hati masyarakat Jawa, berimplikasi pada perilaku bangsawan yang bisa berbuat apa saja kepada *wong cilik*. Menurut pandangan *wong cilik*, bangsawan berhak berbuat apa saja karena bangsawan merupakan priyayi luhur. Bangsawan merupakan sumber kebenaran. Karenanya, perilaku bangsawan menjadi standar perilaku ideal bagi *wong cilik*.

Damono (2000:153) menyatakan bahwa feodalisme yang membudaya dan mengakar didukung oleh semua lapisan masyarakat Jawa tanpa merasa terpaksa. Bahkan, masyarakat mendukung dengan penuh rasa puas. Pendapat tersebut juga didukung oleh Harsono (2005:164) bahwa dalam segala aspek kehidupan tampak

adanya kecenderungan ke arah mempertinggi dan memperluas kebudayaan feodal. Pemusatan kekuasaan pada golongan priyayi memperkuat kecenderungan tersebut

Sosialismanto (2001: 78) menyatakan bahwa ketika kekuasaan kolonial Belanda makin kuat pengaruhnya terhadap golongan priyayi terutama *elite* birokrasi semakin kuat pula kedudukan priyayi juga semakin kuat. Belanda menggunakan elit birokrasi untuk mengeruk keuntungan dari kelompok pribumi. Dengan demikian, feodalisasi semakin berkembang dan membentuk kekuasaan yang otokratis. Pendapat tersebut juga sejalan dengan hasil penelitian Maliki (2003: 351) bahwa elite lokal, dalam hal ini, penguasa Jawa di kota besar Surabaya masih didominasi priyayi dan militer pretorian Jawa. Mereka menduduki birokrasi yang strategis di Surabaya dan sebagai elite penentu kebijakan.

Kayam (2001: 274) dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa Pemerintah Orde Baru membentuk suatu tata kehidupan yang semakin feodalistik dan sentralistik. Kekuasaan terpusat di tangan Soeharto yang kemudian mengalir turun dengan derajat yang semakin rendah melalui jaringan keluarga presiden tersebut, jaringan hierarkis, birokratis, beserta para kroninya.

Hasil penelitian Kayam tersebut memperkuat pernyataan Kartodirdjo, A. Sudewo, dan Hatmosuprobo (1987/1988) bahwa sistem feodal memperkuat otoritas atasan terhadap bawahan. Aliran perintah dan pungutan bergerak dari atas ke bawah, sedang aliran upeti bergerak dari bawah ke atas. Di puncak hierarki, raja menuntut kepatuhan dan penghormatan sebesar-besarnya yang telah dimantapkan secara turun-temurun sebagai orde.

Ajaran feodalisme yang berwujud mitos priyayi luhur dan wahyu atau *pulung* menjadikan kepatuhan pada masyarakat sipil atau *wong cilik*. Kepatuhan tersebut akan mempermudah kelompok priyayi untuk melaksanakan hegemoninya. Untuk memperkokoh kekuasaannya, kelompok priyayi mengajarkan kepada rakyat bahwawong *cilik* hendaknya *pasrah*, *nrino ing pandum*, dan selalu *rila* sabar apabila menghadapi kehendak kelompok priyayi. Semua sikap tersebut akan membentuk kesetiaan *wong cilik* kepada kelompok priyayi.

Di pihak lain, priyayi yang tunduk kepada pemerintahan kolonial selalu mengembangkan sikap kesetiannya. Apabila priyayi tidak setia kepada pemerintahan kolonial, priyayi akan kehilangan posisinya terutama pada zaman tanam paksa. Lembaga yang melaksanakan hegemoni adalah *Ondermemers-bond* (gabungan pengusaha belanda). Semua kepala pemerintahan tunduk kepada lembaga tersebut antara lain residen, bupati, camat, dan lurah. Seorang camat yang menentang kebijakan administrasi pabrik, apabila tidak dipindahkan pasti dipecat. Orang desa yang tidak mau menyewakan tanahnya untuk ditanami tebu, tidak diberi air irigasi. Pemerintah kolonial menghidupkan selamatan agar orang-orang desa sampai kehabisan uang. Kemudian, orang desa tersebut menyewakan tanahnya (Proyek PP dan PKD, 1978: 136).

Hegemoni pemerintahan kolonial kepada priyayi dilaksanakan berdasarkan Surat Edaran tahun 1867. Residen diharapkan menjalankan tugas melalui bupati. Para bupati berkewajiban mengawasi tanam paksa; meneliti perjanjian antara penanam dengan pengusaha Eropa; mencegah semua pembatasan otonomi desa; mengawasi

sekolah pribumi; dan membuat daftar guru-guru agama ( Kartodirdjo, Poesponegoro, dan Notosusanto, 1977: 19).

Pada zaman Jepang, rakyat Indonesia wajib tunduk atau patuh. Rezim kolonial ini di dalam melaksanakan hegemoninya dengan menindas. Jepang menghapus pengaruh barat dan meningkatkan propaganda bernegosiasi dengan pemimpin rakyat. Orang-orang barat yang bekerja dipecat dan yang dicurigai dimasukkan ke dalam kamp konsentrasi. Sebagai penggantinya, pekerjaan diambil alih oleh orang Jepang dan pribumi yang setia (Husein, 2010: 26).

Bedasarkan fakta-fakta tersebut, budaya priyayi yang digunakan untuk melaksanakan hegemoni kepada *wong cilik* dengan kontrol kesetiaan dan bernegosiasi dengan memberi pekerjaan dan hadiah kepada *wong cilik*. Untuk menghadapi hegemoni kepada kelompok yang berkuasa, penjajah misalnya, priyayi menggunakan etiket kesetiaan dan kepatuhan. Dengan demikian, etiket kepatuhan dan kesetiaan digunakan sebagai alat hegemoni oleh kelompok priyayi. Akan tetapi, etiket kesetiaan dan kepatuhan juga digunakan untuk menghadapi hegemoni dari penjajah.

## 6. Nilai-Nilai Pendidikan Karakter

Secara leksikal, nilai memiliki arti sifat-sifat atau hal-hal yang penting atau berguna bagi kemanusiaan (Poerwadarminto, 1983: 677). Makna tersebut memiliki kesamaan dengan pendapat Frondizi ( 2011: 9) bahwa nilai itu bukan merupakan benda atau unsur dari benda, melainkan kualitas yang dimiliki objek tertentu yang dikatakan baik.. Menurut Sjarkawi (2006: 29), nilai dapat dianggap sebagai keharusan suatu “cita” yang menjadi dasar *commit to user* suatu keputusan. Nilai-nilai merupakan bagian

kenyataan yang tidak bisa diabaikan, setiap orang bertingkah laku sesuai dengan seperangkat nilai.

Hal itu sangatlah tepat dengan pernyataan Winarni ( 2009: 51) bahwa karya sastra sebagai alat untuk mendidik. Makin tinggi nilai sebuah karya sastra bila makin banyak mengandung ajaran pendidikan. Suyitno (2011: 80) mengatakan bahwa mendidik adalah membentuk sebuah watak. Nilai-nilai pendidikan berarti merupakan nilai-nilai yang memungkinkan terbentuknya sebuah watak. Fungsi sebuah teks memungkinkan perubahan sikap dan pemaknaan kultural karena teks sastra dapat memberikan pengalaman kultural dalam rentang lama sehingga dapat memberikan perubahan sikap. Pendapat tersebut diperkuat oleh Suroso (2004: 134) bahwa novel multikultural dapat berperan memberikan pencerahan di sekolah dan perguruan tinggi.

Selanjutnya, oleh Ki Hajar Dewantara (Majelis Luhur PT, 2013: 20) dikatakan bahwa pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendapat tersebut sejalan dengan rumusan Balitbang Kemendikbud (2010: 4) bahwa pendidikan adalah suatu upaya sadar untuk mengembangkan potensi peserta didik secara optimal. Padahal, tidak boleh dilepaskan dari lingkungan dan kaidah-kaidah budaya peserta didik berada, karena peserta didik hidup tak terpisahkan dalam lingkungannya. (Balitbang Kemdikbud, 2010: 4).

Muslich K.S., dkk. ( 2006: 5) mengatakan bahwa pendidikan adalah bagian tak terpisahkan dari moral budi pekerti. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Sjarkawi (2006:51) yang mengatakan bahwa pendidikan moral menitikberatkan pada usaha penanaman berbagai kebaikan secara nyata, dengan contoh-contoh, menghargai dan memberi sanksi, memuji dan mencela melalui nasihat dan peringatan.

Pendidikan moral lazim disebut pendidikan karakter. Orang yang berbuat baik, memiliki sopan santun, menghormati kepada orang lain, jujur, memiliki rasa toleransi, penuh kasih sayang, suka bersyukur. Pendidikan moral juga bertujuan agar peserta didik mentaati perintah dan menjauhi larangan baik tertulis maupun tidak tertulis. Peserta didik yang biasa melaksanakan hal tersebut dikatakan sebagai peserta didik memiliki karakter yang baik. Peserta didik memiliki budi pekerti yang baik.

Hal tersebut sejalan dengan pendapat Ki Hajar Dewantara (Majelis Luhur PT, 2013: 485) bahwa pengajaran budi pekerti berarti menyokong perkembangan hidup anak-anak lahir dan batin, dari sifat kodratnya menuju ke arah peradaban dalam sifatnya yang umum. Mengajarkan anak hidup tertib, tidak mengganggu orang lain, menjaga kebersihan, suka menolong, hormat kepada orang tua termasuk pengajaran budi pekerti. Serupa dengan itu, menurut Koesoema A. (2007: 208-211), nilai-nilai yang bisa diajarkan dalam pendidikan karakter adalah nilai keutamaan, nilai keindahan, nilai kerja, nilai cinta tanah air, nilai demokrasi, nilai kesatuan, menghidupi nilai moral, dan nilai-nilai kemanusiaan.



Menurut Lickona (2013: 72), karakter terbentuk dari tiga macam bagian yang saling berkaitan. Pengetahuan moral, perasaan moral, dan perilaku moral. Karakter yang baik terdiri atas mengetahui kebaikan, menginginkan kebaikan, dan melakukan kebaikan. Apabila orang mengetahui sesuatu itu baik, berarti dapat menilai baik atau buruk, orang tersebut berkeinginan untuk melakukan kebaikan. Ketiga hal tersebut penting untuk menjalankan hidup yang bermoral.

Menurut Ki Hajar Dewantara (Majelis Luhur PT, 2013: 25) budi pekerti, watak atau karakter adalah bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan yang menimbulkan tenaga. Budi pekerti merupakan sifat jiwa manusia dari angan-angan hingga terjelma menjadi tenaga. Hal tersebut, oleh Ki Hajar Dewantara (Majelis Luhur PT, 2013: 485), dikatakan metode pengajaran budi pekerti dengan cara *ngreti-ngrasa-nglakoni*.

Berkaitan dengan hal tersebut, yang termasuk dalam pengetahuan moral (*ngreti*) adalah kesadaran moral, mengetahui nilai-nilai moral, pengambilan perspektif, penalaran moral, pengambilan keputusan, dan pengetahuan diri. Yang termasuk perasaan moral (*ngrasa*) adalah hati nurani, penghargaan diri, empati, menyukai kebaikan, kontrol diri, dan kerendahan hati. Kemudian, kompetensi, kemauan, dan kebiasaan termasuk aksi moral (*nglakoni*).

Menurut Foerster (dalam Elmubarak, 2009: 105) ada empat ciri dasar dalam pendidikan karakter. Pertama, keteraturan interior yang berarti setiap tindakan diukur berdasar urutan nilai. Kedua, koherensi yang memberi keberanian mengambil resiko di dalam menghadapi sesuatu. Ketiga, otonomi yaitu menginternalkan nilai-nilai dari

luar menjadi nilai-nilai bagi pribadi tanpa tekanan. Keempat, keteguhan dan kesetiaan merupakan daya tahan seseorang guna mengingini apa yang dipandang baik.

Parker dan Ackerman (2007: 1) menyebutkan ada tiga prinsip penerapan karakter di sekolah yaitu (1) *identification*, (2) *involvement*, dan (3) *insight*. *Identification* berarti peta cerita digunakan untuk memperkenalkan karakter dan melacak plot. *Involment* berarti lingkaran diskusi. Anak disuruh membaca kemudian diminta mendiskusikan petualangan atau humor yang menarik siswa kemudian diminta menyatakan pendapat. *Insight* berarti efek penekanan pada konsekuensi bagi perilaku karakter. Pemahaman prinsip karakter pada isi bab pada akhir lingkaran diskusi sehari-hari. Siswa membandingkan pilihan karakter yang dihadapi sesuai dengan situasi dalam kehidupan mereka sendiri.

Menurut Komensky (dalam Koesoema A, 2010: 149-152), ada sebelas prinsip bagi pembelajaran moral di sekolah sebagai berikut. Pertama, dalam diri kaum muda haruslah ditanamkan semua keutamaan. Kedua, kemampuan dalam mengarahkan pertimbangan intelektual dalam membedakan secara jernih apa yang baik dan buruk. Ketiga, keadilan yaitu menilai segala sesuatu secara seimbang dan adil, atau dalam memberikan penghargaan sesuatu itu apa adanya. Keempat, sikap *ugahari* yaitu kemampuan untuk mengaktualisasikan dan memuaskan dorongan-dorongan keinginan dalam diri serta tuntutan insting secara seimbang melalui cara yang tepat. Kelima, keteguhan yaitu tahan menahan penderitaan, kesulitan, dan sabar. Keenam, bersikap adil yaitu menghindari untuk menipu dan memperlakukan sama kepada orang lain. Ketujuh, kesungguhan menghadapi sesuatu dan berani menanggung

resiko. Kedelapan, percaya kepada tugas yang dibebankan kepada anak didik. Kesembilan, kerja keras menjadi semangat jiwa yang kokoh. Kesepuluh, menjadi manusia bagi orang lain. Kesebelas, penanaman keutamaan dimulai sejak kecil.

Menurut Lickona, Schaps, dan Lewis (2007), pendidikan karakter harus berdasarkan 11 prinsip sebagai berikut. Pertama, mempromosikan nilai-nilai etikaitidan nilai-nilai kinerjamendukungsebagai landasan karakter yang baik. Kedua, mendefinisikan karakter secara komprehensif mencakup pikiran, perasaan, dan perilaku. Ketiga, penggunaan pendekatan yang komprehensif, disengaja, dan proaktif untuk pengembangan karakter. Keempat, menciptakan komunitas sekolah yang peduli. Kelima, memberikan siswa dengan kesempatan untuk tindakan moral. Keenam, memiliki cakupan terhadap kurikulum yang bermakna dan menantang yang menghargai semua siswa, mengembangkan, karakter mereka, dan membantu untuk berhasil. Ketujuh, berupaya untuk membangun motivasi diri siswa. Kedelapan, melibatkan staf sekolah sebagai pembelajaran dan komunitas moral yang berbagi tanggung jawab untuk pendidikan karakter dan upaya untuk mematuhi nilai-nilai inti yang sama yang membimbing pendidikan siswa. Kesembilan, memfungsikan seluruh staf sekolah sebagai komunitas moral yang berbagi tanggung jawab untuk pendidikan karakter, dan setia pada nilai dasar yang sama. Kesepuluh, melibatkan keluarga dan anggota masyarakat sebagai mitra dalam upaya pembangunan karakter. Kesebelas, menilai karakter sekolah, fungsi staf sekolah sebagai pendidik karakter, dan sejauhmana siswa memanifestasikan karakter yang baik.

Ki Hajar Dewantara (Majelis Luhur PT, 2013: 28) memberi istilah cara pendidikan karakter dengan peralatan pendidikan sebagai berikut. Pertama, memberi contoh (*voorbeeld*). Kedua, pembiasaan (*pakulinan, gewoontevorming*). Ketiga, pengajaran (*leering, wulang-wuruk*). Keempat, perintah, paksaan dan hukuman (*regeering en tucht*). Kelima, laku (*zelf beheersching, zelfdiscipline*). Keenam, pengalaman lahir dan batin (*nglakoni, ngrasa, beleving*).

Selanjutnya, Ki Hajar Dewantara (dalam Mudyahardjo, 2001: 306-307) juga mengatakan bahwa tujuan pendidikan tercapai bila ada keteladanan bagi para pendidik atau orang tua apabila pendidik berada pada posisi di depan peserta didik (*Ing ngarso sung tulada*). Apabila pendidik berada di tengah-tengah peserta didik, pendidik atau orang tua hendaklah membangkitkan tekad, kemauan dan tenaga untuk mencapai tujuan pendidikan (*ing madya mangun karso*). Orang tua atau pendidik hendaklah tetap mempengaruhi dengan memberi kesempatan kepada anak-anak untuk berjalan sendiri, tidak harus dituntun dari depan (*tutwuri handayani*).

Berdasarkan berbagai pendapat tersebut, dapatlah dinyatakan bahwa nilai-nilai pendidikan di dalam karya sastra adalah pendidikan moral yang berupa pesan-pesan agar pembaca berbuat baik. Pendidikan moral juga disebut pendidikan budi pekerti atau pendidikan karakter. Agar seseorang bermoral baik, orang tersebut harus mengetahui moral yang baik, merasakan berkeinginan menjadi orang yang bermoral baik, dan mengamalkan moral yang baik. Nilai-nilai moral dalam pendidikan karakter adalah moral ketuhanan, kejujuran, moral kemanusiaan, moral demokrasi, moral kebangsaan, moral keadilan. Pendidikan karakter bisa dilaksanakan dengan berbagai

hal sebagaimana pendapat Komensky yang terdiri sebelas prinsip yang hampir sama dengan pendapat Lickona, Schaps, dan Lewis. Selain itu, pendidikan karakter juga bisa dilaksanakan dengan enam prinsip sebagaimana pendapat Ki Hajar Dewantara. Sebelas prinsip pendidikan karakter yang disarankan oleh Komensky dan dikuatkan oleh Lickona, Schaps, dan Lewis dan 3 prinsip pendidikan karakter yang diungkapkan oleh Parker & Ackerman merupakan pendidikan karakter yang disarankan kepada guru di sekolah. Cara pendidikan karakter yang disarankan oleh Ki Hajar Dewantara bisa berlaku di sekolah, keluarga, dan di lingkungan masyarakat.

Berkaitan dengan hal tersebut, karya sastra merupakan media pendidikan yang disampaikan oleh pengarang dalam arti bukan lembaga sekolah. Nilai-nilai moral dalam karya sastra merupakan ungkapan nilai moral masyarakat pada waktu karya tersebut diceritakan. Oleh sebab itu, cara-cara pendidikan yang digunakan oleh masyarakat Jawa yang terungkap dalam karya sastra juga merupakan cara-cara pendidikan karakter sesuai dengan latar tempat dan waktu dalam cerita, yaitu latar waktu zaman prakemerdekaan hingga zaman Orde Baru awal di tempat yang berlatar belakang budaya Jawa. Berhubungan dengan hal tersebut, pemberian pendidikan karakter yang digunakan untuk menganalisis dalam karya sastra dalam penelitian ini adalah cara pendidikan karakter pada prakemerdekaan sebagaimana yang diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantara yaitu dengan cara : 1) memberi contoh, 2) pembiasaan, 3) pengajaran, 4) perintah, paksaan dan hukuman, 5) *laku*, dan 6) pengalaman lahir batin.

Dalam penelitian ini, nilai pendidikan karya sastra mendapat respons dari pembaca. Oleh karena ini, untuk memperkuat penerapan konsep teori tentang nilai pendidikan, disertakan pula pendapat pembaca yang seperti dinyatakan di depan adalah pembaca serius.

### C. Kerangka Berpikir

Novel merupakan karya tulis fiksi yang berisi ungkapan gagasan dan perasaan pengarang yang ditulis dengan bahasa dengan gaya khas. Penulisan novel berdasarkan tegangan antara kutub fenomena realitas kehidupan dengan fenomena realitas dalam imajinasi. Novel ditulis dengan memadukan dua kutub tersebut menjadi satu kutub yang memiliki kekhasan gagasan dan kekhasan kebahasaan. Fenomena-fenomena dalam realitas kehidupan ada yang disetujui oleh pengarang, ada yang ingin dikembangkan, dan ada yang ditolak oleh pengarang. Sikap pengarang di dalam menghadapi fenomena-fenomena realitas kehidupan ditentukan oleh pengalaman, pengetahuan, tingkat sosial pengarang, dan latar belakang sosial budaya pengarang yang melingkunginya.

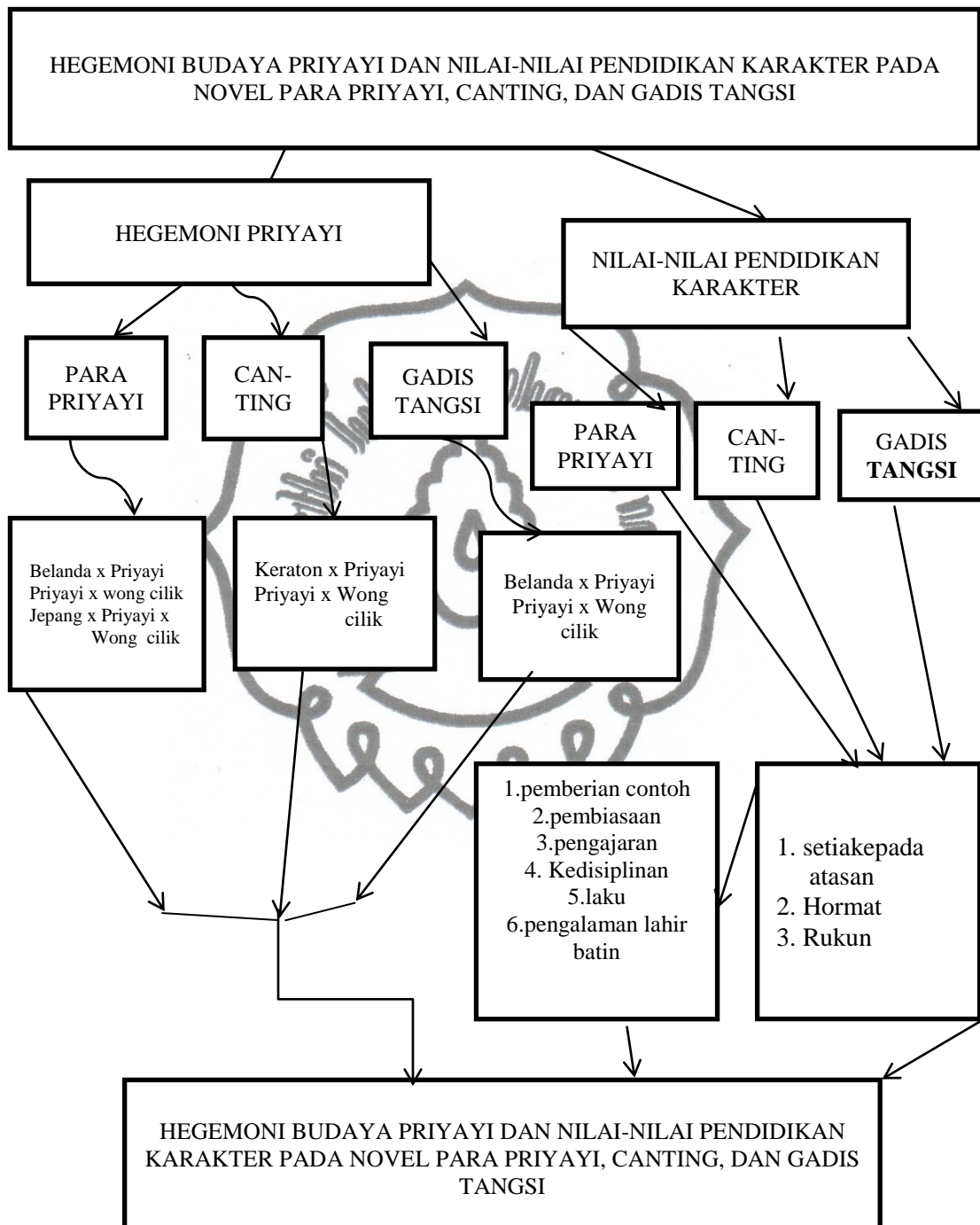
Gagasan pengarang yang terkandung di dalam novel merupakan ungkapan dari realitas sosial budaya yang sesuai dengan ideologi pengarang. Oleh karenanya, novel memiliki fungsi mengembangkan, melestarikan atau menolak budaya yang dianut oleh kelompok masyarakat tertentu. Budaya tersebut digunakan oleh kelompok masyarakat untuk menghegemoni kelompok masyarakat yang lain atau justru terhegemoni oleh kelompok lain. Kelompok masyarakat yang menghegemoni dan kelompok masyarakat yang *commit to user* terhegemoni memiliki kepentingan untuk



mempertahankan masing-masing posisinya dengan budaya untuk mengadakan konsensus, kontrol atau untuk mengadakan resistensi. Budaya tersebut dikembangkan melalui pendidikan karakter kepada kelompoknya.

Untuk memahami kandungan gagasan budaya, hegemoni, dan pendidikan karakter dalam novel tersebut pembaca perlu memaknai. Pengambilan makna sebuah novel ditentukan oleh pembaca dengan cara memberikan interpretasi pada novel. Masing-masing pembaca di dalam menginterpretasi makna akan menghasilkan tafsiran yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, data objektif dalam novel selain diinterpretasi oleh peneliti juga perlu dicocokkan dengan pembaca lain, dan keterangan-keterangan dari pengarang, baik yang berupa data tertulis maupun data hasil wawancara.

Gambaran analisis dan interpretasi data objektif novel *PP*, *Ct*, dan *GT* berawal dari pemikiran keeratan hubungan antara hegemoni kekuasaan, budaya priyayi, dan pendidikan karakter. Hegemoni pada novel *PP* dilakukan oleh Pemerintah Hindia Belanda dan Hindia Belanda. Hegemoni pada novel *Ct* dilakukan oleh keraton, dan hegemoni pada novel *GT* dilakukan oleh Pemerintah Hindia Belanda. Untuk menghadapi hegemoni penguasa Hindia Belanda, priyayi menggunakan budaya setia kepada atasan, hormat, dan rukun dan melanggengkan posisi priyayi melalui pendidikan karakter dengan cara : 1) memberi contoh, 2) pembiasaan, 3) pengajaran, 4) perintah, paksaan dan hukuman, 5) laku, dan 6) pengalaman lahir batin. Hegemoni priyayi kepada *wong cilik* dilakukan dengan mengembangkan mitos kewahyuan, kekuasaan, dan kekuatan sosial ekonomi.



GAMBAR 1  
ALUR KERANGKA BERPIKIR

*commit to user*

Hasil dari investigasi data wawancara dengan data tertulis tersebut disimpulkan sesuai dengan acuan jawaban terhadap permasalahan yang diajukan. Acuan jawaban rumusan masalah itu merupakan hipotesis kerja dengan rumusan sebagai berikut.

1. Budaya priyayi Jawa dalam novel *PP*, *Ct*, dan *GT* sesuai atau tidak sesuai dengan kaidah kesetiaan, rukun, dan hormat
2. Budaya priyayi Jawa menghegemoni atau terhegemoni berhadapan dengan kelompok lain dalam novel *PP*, *Ct*, dan *GT*.
3. Nilai pendidikan karakter priyayi Jawa dalam novel *PP*, *Ct*, dan *GT* sesuai atau tidak sesuai dengan kaidah peneladanan, pembiasaan, pengajaran, perintah paksaan hukuman, laku dan pengalaman batin.